



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU



PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU INSPEKTORAT

Jl. Depati Said No.48 Ulak Lebar Lubuk Linggau Kode Pos 31625

Telp. (0733) 320633 Faksime : (0733) 320633

Pos-el : inspektorat@Lubuk Linggau.go.id. Laman : www.Lubuk Linggau.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU INSPEKTORAT KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN ANGGARAN 2026

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Lubuklinggau untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kota Lubuklinggau.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Lubuklinggau, 30 Maret 2026


INSPEKTUR
Drs. Erwin Armeidi, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700531 199003 1 002

Kata Pengantar

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Pemerintah Kota Lubuk Linggau dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Lubuk Linggau Tahun 2025.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat gambaran tingkat pencapaian kinerja Pemerintah Kota Lubuk Linggau pada tahun 2025.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung pencapaian kinerja dan kelancaran pelaksanaan program kerja di lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau. Masukan konstruktif dan inovatif sangat diharapkan dari semua pihak, sebagai umpan balik (*feed back*) bagi peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Lubuk Linggau dimasa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Lubuk Linggau ini disusun dan kiranya dapat memberikan manfaat untuk perbaikan perencanaan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya Peningkatan Kinerja Pemerintah Kota Lubuk Linggau.

Lubuk Linggau, 30 Maret 2026



WALIKOTA LUBUK LINGGAU,
H. RACHMAT HIDAYAT

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi, misi, sasaran dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul yang dirumuskan dalam visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja misi, tujuan dan sasaran dengan program dan kegiatan tahun berjalan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Visi & Misi Kota Lubuk Linggau adalah SDM berkualitas, sejahtera, religius, serta infrastruktur merata, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 menggambarkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian setiap indikator kinerja sasaran sebagai sarana pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja setiap *stake holder* yang terkait,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjadi salah satu instrument yang digunakan untuk identifikasi permasalahan dan solusi dalam peningkatan kinerja Pemerintah Kota Lubuk Linggau baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan program kegiatan dimasa yang akan datang.

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3 GAMBARAN UMUM DAERAH	2
A. Geografis	3
B. Topografis	5
C. Demografis	6
D. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	7
1.4 KONDISI EKONOMI DAERAH	8
1.5 STRUKTUR PEMERINTAHAN.....	12
1.6 ISU STRATEGIS (STRATEGIC ISSUED) KOTA LUBUKLINGGAU	13
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 15
2.1 RENCANA STRATEGIS	15
1. Visi dan Misi	15
2. Tujuan dan Sasaran	18
2.2 PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN	19
2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025	21
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 23
3.1 PENGUKURAN KINERJA	23
3.2 CAPAIAN KINERJA UTAMA KOTA LUBUKLINGGAU	24
3.3 PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TERHADAP TAHUN SEBELUMNYA DAN AKHIR PERIODE JANGKA MENENGAH	39
3.4 PROGRAM PENUNJANG PENCAPAIAN KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA	42
3.5 REALISASI ANGGARAN	51
 BAB VI PENUTUP	 52

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kota Lubuklinggau Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2025	7
Tabel 1.2 IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2021-2024	8
Tabel 1.3 PDRB Kota Lubuklinggau Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha, 2022-2024 (Miliar Rupiah)	10
Tabel 1.4 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2022-2024 (Miliar Rupiah)	11
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran	18
Tabel 2.2 Program Untuk Pencapaian Sasaran	20
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	21
Tabel 3.1 Sasaran, Indikator, Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun 2025	24
Tabel 3.2 Realisasi Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1), Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) dan Angka Kemiskinan	33
Tabel 3.3 Realisasi Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat	36
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Pemerintah Kota Lubuklinggau dengan Tahun Sebelumnya dan Periode Jangka Menengah Daerah	39
Tabel 3.5 Program Penunjang Pencapaian Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja	43
Tabel 3.6 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025	51

Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 1.1 Peta Batas Administrasi Kota Lubuklinggau	4
Gambar 1.2 Luas Wilayah Kota Lubuklinggau Menurut Kecamatan (km ²)	6
Gambar 1.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau	12
Gambar 3.1 Keterkaitan Misi dengan Program Kerja dan Kegiatan Unggulan	26
Gambar 3.2 Program Kerja Unggulan	27
Gambar 3.3 Target Indikator Indeks Pengetahuan	27
Gambar 3.4 Target Indikator Indeks Kesehatan	28
Gambar 3.5 Target pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka	32
Gambar 3.6 Target penurunan angka kemiskinan di Kota Lubuklinggau	34

Bab 1

Pendahuluan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka terselenggaranya good governance diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang nantinya disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. LKjIP Pemerintah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 disusun secara transparan dan akuntabel yang berisi Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Lubuk Linggau yang berisi pertanggungjawaban akan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

LKjIP Kota Lubuk Linggau merupakan salah satu bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Lubuk Linggau dalam dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Selain itu, LKjIP menjadi salah satu instrument yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan dan solusi dalam peningkatan kinerja Pemerintah Kota baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan program kegiatan dimasa yang akan datang.

1.3. GAMBARAN UMUM DAERAH

Tahun 1928 status Lubuk Linggau adalah sebuah dusun sebagai Ibu Kota Marga Sindang Kelingi Ilir, di bawah Onder District Musi Ulu. Marga Sindang Kelingi Ilir adalah salah satu dari 10 Marga dalam wilayah (dekonsentrasi) Onder Afdeling Musi Ulu. Onder Afdeling Musi Ulu sendiri ibu kotanya adalah Muara Beliti.

Pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Kertapati Palembang-Lahat-Lubuk Linggau tahun (1928-1932) yang tidak melintasi Muara Beliti maka dari sudut praktis Pemerintahan Muara Beliti sebagai Ibukota Onder Afdeling Musi Ulu tersebut tidak dapat dipertahankan lagi sebagai Ibu Kota Onder Afdeling Musi Ulu. Tahun 1933 Ibukota Onder Afdeling Musi Ulu dipindah dari Muara Beliti ke Lubuk Linggau. Muara Beliti tetap menjadi Ibu Kota dari Onder District Muara Beliti.

Tahun 1942-1945 Lubuk Linggau menjadi Ibukota Kewedanaan Musi Ulu dan dilanjutkan setelah kemerdekaan. Pada waktu Clash I tahun 1947, Lubuk Linggau dijadikan Ibukota Pemerintahan Provinsi Sumatera Bagian Selatan. Tahun 1948 Lubuk Linggau menjadi Ibukota Kabupaten.

Musi Ulu Rawas dan tetap sebagai Ibukota Keresidenan Palembang. Pada tahun 1956 Lubuk Linggau menjadi Ibukota Daerah Swatantra Tingkat II Musi Rawas. Tahun 1981 dengan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1981 Tanggal 30 Oktober 1981 Lubuk Linggau ditetapkan statusnya sebagai Kota Administratif.

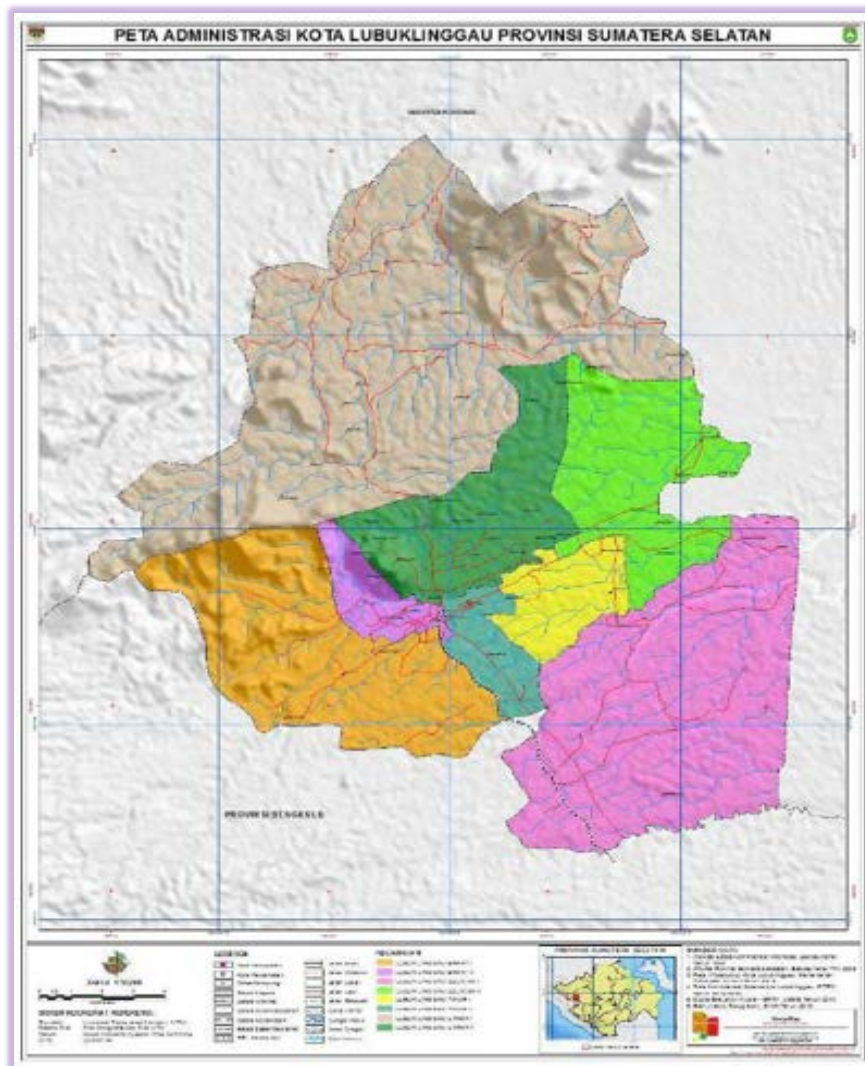
Pemerintah Kota Lubuk Linggau merupakan daerah otonom yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2001 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114).

Wilayah Pemerintah Kota Lubuk Linggau meliputi 8 kecamatan dan 72 kelurahan dengan jumlah penduduk per Desember tahun 2023 kurang lebih 241.894 jiwa.

A. Geografis

Secara astronomis, Lubuk Linggau terletak pada posisi $102^{\circ}40'00''$ - $103^{\circ}30'00''$ Bujur Timur (BT) dan $3^{\circ}4'10''$ - $3^{\circ}22'30''$ Lintang Selatan (LS), dan terletak pada ketinggian 129 m dari atas permukaan air laut, dengan luas wilayah Kota Lubuk Linggau adalah lebih kurang $401,50 \text{ km}^2$, atau sama dengan 40.150 Ha dan batas wilayah secara geografis sebagai berikut:

a. Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Kecamatan Tugumulyo dan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.
b. Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas dan Provinsi Bengkulu.
c. Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Provinsi Bengkulu.
d. Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Kecamatan Selangit dan Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas.



Gambar 1.1 Peta Batas Administrasi Kota Lubuk Linggau

Secara geografi yang sedemikian strategis dan terletak di persimpangan jalur kegiatan ekonomi regional yang sangat dinamis, Kota Lubuk Linggau memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sentra *processing zone* atau pusat kegiatan industri pengolahan yang berbasis pada sumber daya daerah sekitarnya, terutama industri pengolahan produk pertanian, kehutanan, perkebunan serta peternakan dan perikanan.

Di samping itu, Lubuk Linggau juga berpotensi untuk dikembangkan sebagai *intermediate city* yang menghubungkan kegiatan ekonomi dan bisnis dari kota-kota besar regional lainnya dengan daerah kabupaten di sekitarnya.

B. Topografis

Dari luas wilayah 401,50 km², kurang lebih 66,5% dataran rendah yang subur dengan struktur 62,75% tanah liat, dengan keadaan alamnya terdiri dari hutan potensial, sawah, ladang kebun karet dan kebun lainnya. Di Kota Lubuk Linggau tidak terdapat gunung berapi. Di bagian sebelah barat terdapat sebuah bukit yang dikenal dengan Bukit Sulap. Di Kota Lubuk Linggau terdapat sungai besar yaitu Sungai Kelingi yang merupakan sumber air untuk irigasi lahan persawahan di Kota Lubuk Linggau dan sebagian Kabupaten Musi Rawas.

Kota Lubuk Linggau mempunyai iklim tropis basah dengan variasi curah hujan rata-rata antara 35,0-574,5 mm per bulan, dimana setiap tahun jarang sekali ditemukan bulan kering. Keadaan tanah kota ini terdiri dari:

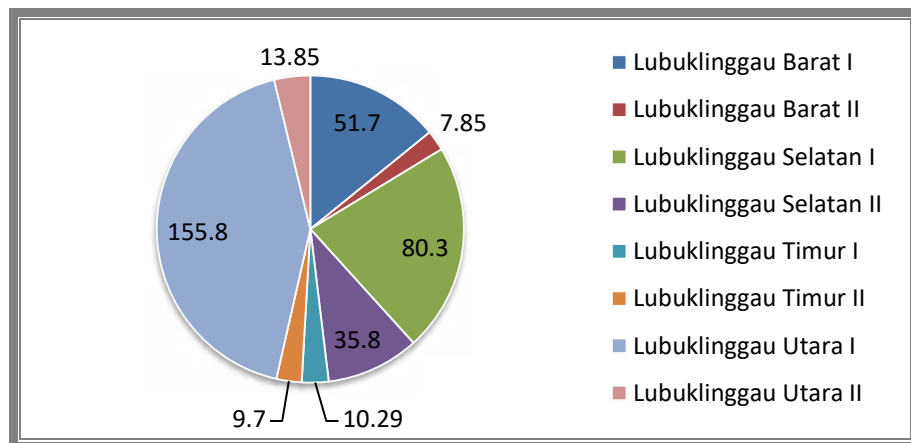
- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Aluvial | : Tanah warna coklat kekuning-kuningan, dijumpai di bagian dataran Kota Lubuk Linggau, cocok untuk tanaman padi sawah dan palawija. |
| 2. Asosiasi Gleihumus | : meliputi 7,17% dari luas kota yang sebagian besar terdapat di Kecamatan Lubuk Linggau Selatan, dan cocok untuk tanaman padi. |
| 3. Litosol | : cocok untuk tanaman keras dan rumput-rumputan, sehingga berpotensi untuk pengembangan ternak. |
| 4. Regosol | : sebagian besar terdapat di Kecamatan Lubuk Linggau Selatan, yang cocok |

untuk tanaman padi, palawija dan tanaman keras lainnya.

Jarak dari Ibukota Lubuk Linggau ke Kecamatan dan Ibukota Provinsi (penghitungan berdasarkan jarak yang digunakan oleh angkutan darat/jalan raya):

- Lubuk Linggau ke Lubuk Linggau Barat I : 5 Km
- Lubuk Linggau ke Lubuk Linggau Barat II : 2 Km
- Lubuk Linggau ke Lubuk Linggau Timur I : 7 Km
- Lubuk Linggau ke Lubuk Linggau Timur II : 3 Km
- Lubuk Linggau ke Lubuk Linggau Utara I : 11 Km
- Lubuk Linggau ke Lubuk Linggau Utara II : 3 Km
- Lubuk Linggau ke Lubuk Linggau Selatan I : 10 Km
- Lubuk Linggau ke Lubuk Linggau Selatan II : 8 Km
- Lubuk Linggau ke Palembang : 388 Km

Luas wilayah menurut Kecamatan di Kota Lubuk Linggau, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1.2 Luas Wilayah Kota Lubuk Linggau Menurut Kecamatan (km²)

C. Demografis

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuk Linggau per Desember 2025 tercatat berjumlah 251.457 jiwa yang terdiri atas 126.712 jiwa penduduk laki-laki dan

124.745 jiwa penduduk perempuan. Penduduk Kota Lubuk Linggau mengalami kenaikan sebesar 9.563 jiwa dibandingkan posisi akhir Desember 2023 yang berjumlah 241.894 jiwa.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kota Lubuk Linggau Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2025

Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Tidak/Belum Sekolah	37.450	34.871	72.321
02. Tidak Tamat SD/ Sederajat	10.813	9.960	20.773
03. Tamat SD/Sederajat	22.212	24.831	47.043
04. SLTP/Sederajat	14.736	14.617	29.353
05. SLTA/Sederajat	31.185	27.378	58.563
06. Diploma I/II	275	491	766
07. Akademi/Diploma III/ Sarjana Muda	1.011	2.447	3.458
08. Diploma IV/Strata I	8.252	9.568	17.820
09. Strata II	761	569	1.330
10. Strata III	17	13	30
Jumlah	126.712	124.745	251.457

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

D. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Lubuk Linggau dari tahun 2021 hingga tahun 2024 cenderung mengalami kenaikan tiap tahunnya. Pada tahun 2024 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Lubuk Linggau mencapai 78,98. Selama kurun waktu tersebut status pembangunan manusia di Kota Lubuk Linggau masuk dalam kategori menengah atas. Hal ini ditunjukkan dari angka IPM yang selalu berada di atas angka 70. Nilai IPM Kota Lubuk Linggau pada tahun 2024 berada di urutan kedua di Provinsi Sumatera Selatan setelah Kota Palembang.

Tabel 1.2 IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2021-2024

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Ogan Komering Ulu	71,79	72,41	73,17	73,70
02. Ogan Komering Ilir	69,33	70,17	70,80	71,48
03. Muara Enim	70,95	71,52	72,33	73,10
04. Lahat	70,62	71,45	72,15	72,83
05. Musi Rawas	69,26	70,04	70,52	71,21
06. Musi Banyuasin	70,25	70,73	71,30	72,27
07. Banyuasin	69,15	69,95	70,67	71,55
08. Ogan Komering Ulu Selatan	67,85	68,33	69,05	70,00
09. Ogan Komering Ulu Timur	71,68	72,33	73,05	73,64
10. Ogan Ilir	70,40	71,20	72,01	72,67
11. Empat Lawang	67,77	68,39	69,07	69,63
12. Penukal Abab Lematang Ilir	67,03	67,89	68,78	69,63
13. Musi Rawas Utara	67,94	68,76	69,63	70,45
14. Palembang	80,46	81,19	81,72	82,29
15. Prabumulih	76,30	77,14	78,07	78,68
16. Pagar Alam	71,47	72,40	73,25	74,00
17. Lubuk Linggau	77,09	77,71	78,36	78,98
Sumatera Selatan	71,83	72,48	73,18	73,84

Sumber: KLDA 2024, BPS Kota Lubuk Linggau

1.4. KONDISI EKONOMI DAERAH

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang sering digunakan sebagai ukuran untuk menilai hasil pembangunan khususnya dalam bidang ekonomi. Indikator ini dihitung menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan yang telah mengeliminasi pengaruh inflasi, sehingga tergambar kapasitas produksi yang dapat dihasilkan oleh suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. Dengan perkataan lain, pertumbuhan ekonomi mencerminkan tingkat pertumbuhan output dalam suatu perekonomian.

Nilai PDRB Kota Lubuk Linggau atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 mencapai 8.717,86 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 484,15 miliar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha. Sementara itu, berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB mengalami kenaikan sebesar 48,42 miliar menjadi 871,786 miliar rupiah. Sepanjang tahun 2024, Kota Lubuk Linggau mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 5,88 persen. Hal ini menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat yang semakin bagus.

Pada tahun 2024, kinerja ekonomi di Kota Lubuk Linggau dari seluruh sektor lapangan usaha semakin baik. Dari 17 lapangan usaha, laju pertumbuhan di sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 17,12 persen dibandingkan tahun lalu. Hal ini didukung dengan meningkatnya tingkat penghunian hotel di Kota Lubuk Linggau. Sementara itu, sektor Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang berkontraksi sebesar 2,34 persen dibandingkan tahun lalu.

Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase menunjukkan besarnya peran masing-masing kategori lapangan usaha dalam menciptakan nilai tambah. Apabila struktur ekonomi disajikan dari waktu ke waktu maka dapat dilihat perubahan struktur perekonomian yang terjadi. Pergeseran struktur ekonomi ini sering digunakan sebagai indikator untuk menunjukkan adanya suatu proses pembangunan.

Selama periode 2022-2024, struktur ekonomi Kota Lubuk Linggau masih didominasi oleh perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor serta kegiatan konstruksi. Meskipun lapangan usaha ini secara berturut-turut di tahun 2019 dan tahun 2020 atau pada saat krisis Covid 19 pertumbuhannya berkontraksi minus 2,89 persen dan minus 0,51 persen namun kontribusi dari lapangan usaha ini masih di atas 20 persen dari total PDRB Kota Lubuk Linggau. Pada tahun 2024, kontribusi kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dalam perekonomian Kota Lubuk

Linggau sebesar 23,18 persen sedangkan kategori konstruksi sebesar 21,08 persen.

Produk Domestik Regional Bruto Kota Lubuk Linggau Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut Lapangan Usaha 2020-2022, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.3 PDRB Kota Lubuk Linggau Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha, 2022-2024 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		2022	2023*)	2024**)
(1)		(2)	(3)	(4)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	372,27	389,52	415,54
B.	Pertambangan dan Penggalian	128,71	129,07	133,41
C.	Industri Pengolahan	548,46	598,61	624,06
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	9,62	9,98	10,42
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,97	14,51	14,17
F.	Konstruksi	1.702,76	1.769,93	1838,36
G.	Perdagangan Besar dan Eceran	1.730,91	1.908,71	2063,73
H.	Transportasi dan Pergudangan	485,74	543,09	566,38
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	340,29	385,75	451,7
J.	Informasi dan Komunikasi	119,72	127,65	131,85
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	368,72	381,56	391,65
L.	Real Estat	687,11	727,21	748,08
M,N	Jasa Perusahaan	96,12	101,55	112,07
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	184,60	187,49	197,97
P.	Jasa Pendidikan	367,45	391,15	422,03
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	156,52	160,93	169,41
R,S,T,U	Jasa Lainnya	374,87	406,99	427,02
PDRB		7.687,85	8.233,71	8.717,86

Keterangan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber: KLDA 2024, BPS Kota Lubuk Linggau

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 menurut Lapangan Usaha tahun 2022-2024, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.4 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2022-2024 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		2022	2023*)	2024**)
(1)			(3)	(4)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	253,27	254,37	265,02
B.	Pertambangan dan Penggalian	80,55	79,64	82,28
C.	Industri Pengolahan	310,39	326,65	331,15
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	5,77	5,97	6,22
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,22	10,60	10,31
F.	Konstruksi	1002,50	1 038,23	1.077,87
G.	Perdagangan Besar dan Eceran	833,28	893,28	958,83
H.	Transportasi dan Pergudangan	299,30	322,56	332,97
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	185,96	208,47	235,88
J.	Informasi dan Komunikasi	98,57	104,83	107,54
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	251,53	258,07	263,79
L.	Real Estat	467,72	489,50	503,02
M,N	Jasa Perusahaan	53,89	56,24	60,70
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	138,14	138,49	145,34
P.	Jasa Pendidikan	279,22	292,03	306,64
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	112,29	113,80	117,13
R,S,T,U	Jasa Lainnya	267,29	286,72	300,37
PDRB		4.671,90	4.879,45	5.105,06

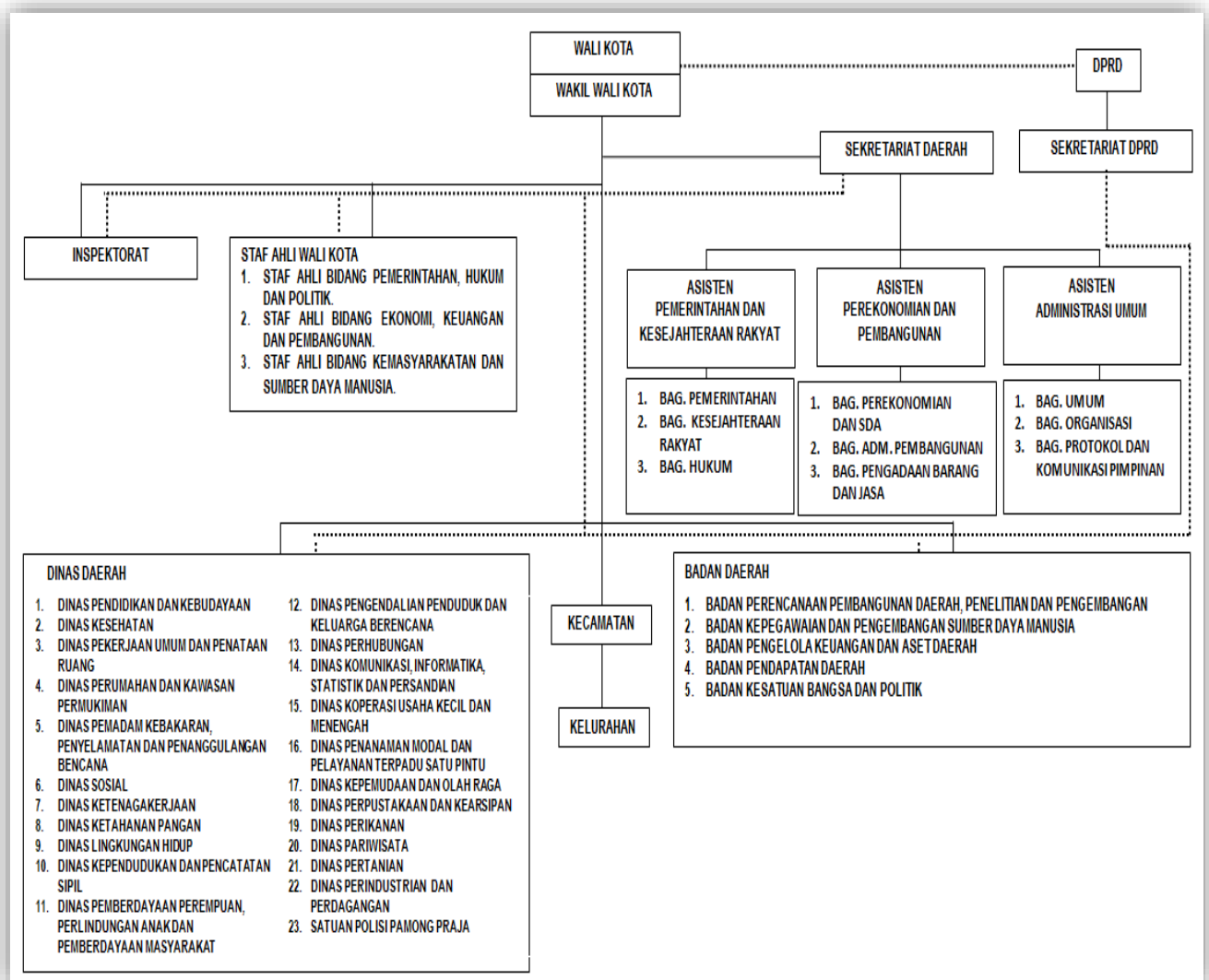
Keterangan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber: KLDA 2024, BPS Kota Lubuk Linggau

1.5. STRUKTUR PEMERINTAHAN

Dalam rangka penyelenggaraan roda pemerintahan Kota Lubuk Linggau sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau dan Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuk Linggau, sebagai berikut:



Gambar 1.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau

1.6. ISU STRATEGIS (STRATEGIC ISSUED) KOTA LUBUK LINGGAU

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu strategis pembangunan Kota Lubuk Linggau dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah kedepan. Isu strategis Kota Lubuk Linggau, sebagai berikut :

1. Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Penanggulangan Kemiskinan
 - A. Kesehatan
 - B. Pendidikan
 - C. Kemiskinan, Kesejahteraan Sosial dan Pengangguran
 - D. Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan
 - E. Ketahanan Pangan
2. Peningkatan Daya Saing Daerah
3. Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah
 - A. Infrastruktur
 - a. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Berpenghasilan Rendah Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau;
 - b. Peningkatan Cakupan Layanan dan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Permukiman;
 - c. Peningkatan Konektivitas Wilayah;
 - d. Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - B. Lingkungan Hidup
 - a. Pengendalian Pembangunan Berwawasan Lingkungan;
 - b. Peningkatan Kelestarian Kawasan Lindung;
 - c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Melalui Penyediaan Ruang Terbuka Hijau;
 - d. Peningkatan Kesesuaian Penggunaan Lahan;

e. Peningkatan Kualitas Sanitasi Lingkungan Kawasan Permukiman.

4. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Bab 2

Perencanaan Kinerja



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

1. Visi dan Misi

Berdasarkan kondisi Kota Lubuk Linggau dan tantangan yang dihadapi dalam 20 tahunan dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh Kota Lubuk Linggau dan amanat pembangunan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Visi Pembangunan Jangka Panjang Kota Lubuk Linggau Tahun 2005-2025 adalah:

“Terwujudnya Kota Lubuk Linggau yang Maju dan Sejahtera”

Dalam mewujudkan Visi Tersebut ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. **Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila** adalah melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dan sebagai warga kota Lubuk Linggau dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika kebangsaan;

2. **Mewujudkan kota yang berdaya-saing** melalui pembangunan sumber daya manusia berkualitas yang menguasai keahlian dan ketrampilan yang diperlukan dalam mengolah sumber daya ekonomi lokal yang diperlukan oleh pasar lokal, regional dan internasional, serta memperkuat fundamental perekonomian lokal melalui pengembangan potensi unggulan ekonomi daerah, memperkuat posisi sebagai kota transit dan pusat kegiatan industri dan jasa dalam keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.
3. **Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum** melalui pembinaan dan pengembangan budaya dan kearifan lokal, memperkuat peran masyarakat sipil, pembinaan kelembagaan politik, memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah, meningkatkan kualitas hubungan kerja kelembagaan antar seluruh unit kerja pemerintahan secara vertical dan horizontal, menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat, dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil;
4. **Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan** melalui percepatan pembangunan daerah dalam rangka mengurangi kesenjangan sosial dan kesenjangan pembangunan antar wilayah kecamatan, keberpihakan kepada kelompok masyarakat ekonomi lemah dan sub wilayah tertinggal, menanggulangi kemiskinan dan

pengangguran secara terfokus, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

5. **Mewujudkan Kota Lubuk Linggau yang maju, asri dan lestari** melalui penataan ruang dan tataguna lahan yang mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang senafas dengan konservasi lingkungan hidup dan taman nasional dalam rangka mewujudkan keseimbangan ekosistem yang berkelanjutan untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan, serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.
6. **Mewujudkan tata pemerintahan yang baik** melalui pembentukan organisasi pemerintahan kota yang minim struktur kaya fungsi, menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sesuai batas kewenangan dan berorientasi pada peningkatan pelayanan umum, membina hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif daerah dalam semangat kemitraan yang seimbang dan sejati, membina hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah, membangun hubungan kerja koordinatif dan konsultatif dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan seluruh Departemen dan lembaga pemerintah pusat, melembagakan budaya kerja yang berorientasi pada efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan prima, menumbuhkembangkan semangat kewirausahaan ditengah-tengah masyarakat serta meningkatkan daya saing seluruh unit usaha ekonomi lokal

dari semua ukuran dan skala dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Visi dan Misi Pembangunan Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2025 maka disusun tujuan dan sasaran pembangunan Kota Lubuk Linggau sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran

MISI		TUJUAN		SASARAN	
VISI : TERWUJUDNYA KOTA LUBUK LINGGAU YANG SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING					
(1)		(2)		(3)	
1.	Meningkatkan perluasan akses terhadap pelayanan Pendidikan dan kesehatan	1.1.	Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan kesehatan	1.1.1.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
				1.1.2.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
2.	Meningkatkan Daya Saing Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	2.1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	2.1.1.	Terwujudnya iklim usaha dan investasi yang kondusif
				2.1.2.	Meningkatnya nilai PDRB sector perdagangan dan jasa
				2.1.3.	Meningkatnya pertumbuhan Industri
				2.1.4.	Meningkatnya pengembangan pariwisata
		2.2.	Meningkatkan kesejahteraan sosial	2.2.1.	Menurunnya pengangguran
				2.2.2.	Meningkatnya daya beli masyarakat
				2.2.3.	Menurunnya tingkat kemiskinan
				2.2.4.	Menguatnya ketahanan pangan daerah
3.	Meningkatkan Infrastruktur Daerah yang Berwawasan Lingkungan	3.1.	Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur perkotaan	3.1.1.	Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman
				3.1.2.	Meningkatnya infrastuktur dasar

MISI		TUJUAN		SASARAN	
VISI : TERWUJUDNYA KOTA LUBUK LINGGAU YANG SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING					
(1)		(2)		(3)	
				3.1.3.	Meningkatnya pengembangan wilayah
				3.1.4.	Terjaganya kualitas lingkungan hidup perkotaan
4.	Percepatan Perwujudan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola yang Pemerintahan yang Baik	4.1.	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	4.1.1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
				4.1.2.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel
				4.1.3.	Meningkatnya kapasitas birokrasi

2.2. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Dalam menjabarkan strategi dan kebijakan umum pembangunan, Pemerintah Kota Lubuk Linggau mengupayakan pencapaian misi pembangunan Kota Lubuk Linggau sebagai berikut:

Table 2.2. Program Untuk Pencapaian Sasaran

Misi/Sasaran	Didukung jumlah program
Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, Sejahtera dan Religius	
Meningkatnya Kualitas pendidikan masyarakat	3
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas	4
Misi 2 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	
Terwujudnya iklim usaha dan investasi yang kondusif	4
Meningkatnya nilai PDRB sector perdagangan dan jasa	5
Meningkatnya pertumbuhan Industri	2
Meningkatnya pengembangan pariwisata	3

Misi/Sasaran	Didukung jumlah program
Menurunnya pengangguran	8
Meningkatnya daya beli masyarakat	2
Menurunnya tingkat kemiskinan	11
Menguatnya ketahanan pangan daerah	9
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur	
Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman	1
Meningkatnya infrastuktur dasar	5
Meningkatnya pengembangan wilayah	3
Terjaganya kualitas lingkungan hidup perkotaan	8
Misi 4 : Percepatan Perwujudan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	11
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	7
Meningkatnya kapasitas birokrasi	7

2.1. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja Kota Lubuk Linggau ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025 Kota Lubuk Linggau. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Perjanjian Kinerja tahun 2025 Pemerintah Kota Lubuk Linggau sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi 1 : Meningkatkan Perluasan Akses Terhadap Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan				

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	72,446	Indeks
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Indeks Kesehatan	0,711	Indeks
Misi 2 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi				
4	Terwujudnya iklim usaha dan investasi yang kondusif	Nilai ICOR	8,484	Nilai
5	Meningkatnya nilai PDRB sektor perdagangan dan jasa	PDRB sektor perdagangan dan jasa	2.178,88	Rp (Miliar)
6	Meningkatnya pertumbuhan industri	Laju pertumbuhan sektor industri terhadap PDRB	7,59	%
7	Meningkatnya pengembangan pariwisata	Kontribusi pariwisata terhadap PDRB	4,11	%
8	Menurunnya pengangguran	Tingkat pengangguran Terbuka	4,62	%
9	Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks pengeluaran	0,77	Indeks
10	Menurunnya tingkat kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,45	Indeks
		Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,23	Indeks
		Angka Kemiskinan	12,23	%
11	Menguatnya ketahanan pangan	Rasio kecukupan pangan	1,16	Rasio
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur				
12	Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman	Luas Kawasan Kumuh	412,8	Ha
13	Meningkatnya infratsruktur dasar	Indeks Infrastruktur Dasar Perkotaan	67,67	%
14	Meningkatnya pengembangan wilayah	Indeks Aksesibilitas	0,808	Indeks

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15	Terjaganya kualitas lingkungan hidup perkotaan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,37	Indeks
Misi 4 : Percepatan Perwujudan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
16	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,57	Indeks
		Indeks Kepuasan Masyarakat	83,25	Indeks
17	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	BB	Nilai
18	Meningkatnya kapasitas birokrasi	Indeks Kapasitas Birokrasi	70,15	Indeks

Bab 3

Akuntabilitas Kinerja



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja serta Petunjuk Teknis Reviu Laporan Kinerja.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Lubuk Linggau dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama.

Pengukuran kinerja Pemerintah Kota Lubuk Linggau mempergunakan metode rumus perhitungan sebagai berikut :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih jelas mengenai penyebab tercapai ataupun kegagalan kinerja.

3.2. CAPAIAN KINERJA UTAMA KOTA LUBUK LINGGAU

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kota Lubuk Linggau dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Pada Tahun 2025 dari 25 indikator sebanyak 12 indikator berhasil tercapai 8 indikator tidak berhasil tercapai, dan 4 indikator belum dirilis.

Tabel 3.1 Sasaran, Indikator, Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
TUJUAN : Meningkatkan perluasan akses terhadap pelayanan Pendidikan dan kesehatan			
1. Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	0,711 Indeks	0,713 Indeks

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
2. Meningkatnya kualitas kesehatan	Indeks Kesehatan	0,777 Indeks	0,780 Indeks
TUJUAN : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi			
3. Terwujudnya iklim usaha dan investasi yang kondusif	Nilai ICOR	8,484 Nilai	8,24 Nilai
4. Meningkatnya nilai PDRB sektor perdagangan dan jasa	PDRB sektor perdagangan dan jasa	2.178,88 Rp (Miliar)	2.487,48 Rp (Miliar)
5. Meningkatnya pertumbuhan industri	Laju pertumbuhan sektor industri terhadap PDRB	7,59 %	7,21 %
6. Meningkatnya pengembangan pariwisata	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	4,11 %	5,4 %
TUJUAN : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial			
7. Menurunnya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,62 %	Belum Rilis
8. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Indeks Pengeluaran	0,77 Indeks	0,55 Indeks
9. Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,45 Indeks	1,1 Indeks
	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,23 Indeks	0,16 Indeks
	Angka Kemiskinan	12,23 %	10,49 %
10. Menguatnya Ketahanan Pangan Daerah	Rasio Kecukupan Pangan	1,16 Rasio	Belum Rilis
TUJUAN : Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur			
11. Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman	Luas Kawasan Kumuh	412,8 Ha	250,63 Ha
12. Meningkatnya infrastuktur dasar	Indeks Infrastruktur Dasar Perkotaan	67,67 %	66,12 %
13. Meningkatnya pengembangan wilayah	Indeks Aksesibilitas	0,808 Indeks	0,581 Indeks
14. Terjaganya kualitas lingkungan hidup perkotaan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,67 Indeks	66,12 Indeks
TUJUAN : Mewujudkan Reformasi Birokrasi			
15. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,57 Indeks	4,70 Indeks
	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,25 Indeks	83,81 Indeks
16. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	BB Nilai	BB(74,77) Nilai
17. Meningkatnya kapasitas birokrasi	Indeks Kapasitas Birokrasi	70,15 Indeks	Belum Rilis Indeks

Dalam rangka pencapaian kinerja, Pemerintah Kota Lubuk Linggau terus melakukan berbagai pembenahan khususnya dalam penerapan manajemen kinerja, integrasi sistem penganggaran dan perencanaan serta mewajibkan setiap Kepala Perangkat Daerah terlibat langsung dalam penyusunan dokumen perencanaan, penentuan arah kebijakan yang harus diambil untuk pencapaian kinerja masing-masing Perangkat Daerah. Selain itu, Kepala Perangkat Daerah harus mampu mempublikasikan kemajuan penerapan manajemen kinerja dilingkungannya kepada Kepala Daerah.

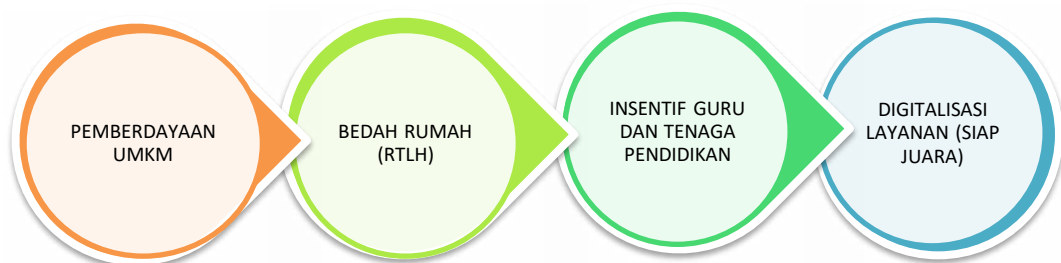
Beberapa Kebijakan dan Program Unggulan Daerah dalam rangka pencapaian kinerja, sebagai berikut:





Gambar 3.1 Keterkaitan Misi dengan Program Kerja dan Kegiatan Unggulan

PROGRAM KERJA UNGGULAN

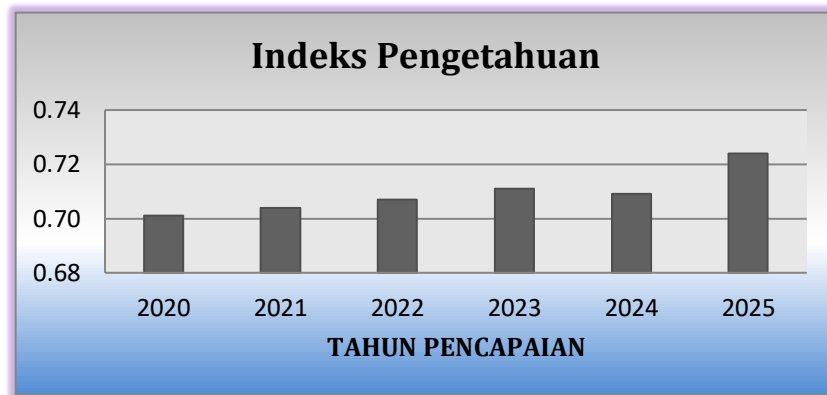


Gambar 3.2 Program Kerja Unggulan

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat

Untuk mengukur keberhasilan sasaran ini, dilakukan melalui 1 indikator yaitu Indeks Pengetahuan. Indikator ini merupakan indikator komposit yang menggambarkan sejauh mana hasil pembangunan pendidikan dilihat dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.

Pada tahun 2025 Realisasi Indeks Pengetahuan berhasil tercapai, dimana dari target yang ditetapkan 0,711 terealisasi sebesar 0,724 sehingga didapat capaian di atas 108,48%.



Gambar 3.3 Target Indikator Indeks Pengetahuan

2. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat Yang Berkualitas

Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator Indeks Kesehatan, yang menggambarkan angka harapan hidup waktu lahir setiap penduduk di Kota Lubuk Linggau.

Peningkatan kesehatan masyarakat merupakan program prioritas Kepala Daerah dalam rangka pembangunan Sumber Daya Manusia di Kota Lubuk Linggau. Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat bidang kesehatan, peningkatan kualitas layanan, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan akan terus ditingkatkan sehingga akan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Pada tahun 2025 Indeks Kesehatan berhasil tercapai di atas 100% dimana dari target sebesar 0,777 telah terealisasi sebesar 0,853. Berikut merupakan gambaran target pencapaian kinerja terhadap peningkatan kesehatan masyarakat Kota Lubuk Linggau:



Gambar 3.4 Target Indikator Indeks Kesehatan

Realiasi dan capaian Sasaran 1 dan 2 di atas diharapkan mampu mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas di Kota Lubuk Linggau. Pencapaian tujuan ini diukur dengan 1 Indikator tujuan yaitu Indeks Sumber Daya Manusia (ISDM).

3. Terwujudnya Iklim Usaha dan Investasi yang Kondusif

Realisasi pencapaian sasaran ini dilakukan melalui 1 Indikator nilai *The Incremental Capital-Output Ratio* (ICOR), hal ini menggambarkan rasio antara investasi dengan pertumbuhan output atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besarnya investasi pada tahun berjalan di suatu daerah akan berpengaruh terhadap besarnya PDRB pada tahun berikutnya.

Pada tahun 2025 Nilai ICOR berhasil tercapai di atas 100% yang mana dari target yang ditetapkan sebesar 8,484 terealisasi sebesar 8,24.

4. Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Perdagangan dan Jasa

Berbagai kebijakan akan dilakukan Pemerintah Kota Lubuk Linggau guna meningkatkan kinerja perdagangan daerah seperti pembangunan kawasan industri, revitalisasi pasar tradisional modern dan kebijakan pembangunan infrastruktur pendukung kinerja perdagangan.

Sasaran ini diukur dengan 1 Indikator PDRB sektor perdagangan dan jasa. Pada tahun 2025 indikator ini berhasil tercapai dengan capaian di atas 100% dimana dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.178,88 (Miliar) realisasinya adalah sebesar Rp2.487,48 (Miliar).

5. Meningkatnya pertumbuhan industri

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator Laju pertumbuhan sektor industri terhadap PDRB, untuk tahun 2025 indikator ini berhasil tercapai dimana dari target yang ditetapkan sebesar 7,59% realisasinya adalah 7,21%, sehingga capaiannya adalah sebesar 94,99%.

6. Meningkatnya Pengembangan Pariwisata

Kota Lubuk Linggau merupakan kota yang bergerak pada sektor perdagangan dan jasa seperti umumnya daerah perkotaan maka potensi Sumber Daya Alam (SDA) tidak begitu signifikan menopang perekonomian daerah.

Hal inilah yang menjadi peluang daerah dalam meningkatkan pengembangan pariwisata baik berupa jenis pariwisata alam maupun pariwisata buatan sebagai hasil kreasi dan inovasi Pemerintah Daerah. Pengembangan pariwisata merupakan program prioritas pemerintah yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian di Kota Lubuk Linggau.

Sasaran ini diukur dengan Indikator Kontribusi pariwisata terhadap PDRB, yang mana pada tahun 2025 berhasil tercapai di atas 100% dimana dari target yang ditetapkan sebesar 4,11% realisasinya adalah sebesar 5,4%.

Sasaran 4 sampai dengan sasaran 7 di atas merupakan upaya dalam rangka mencapai tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang keberhasilannya diukur dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi.

7. Menurunnya Pengangguran

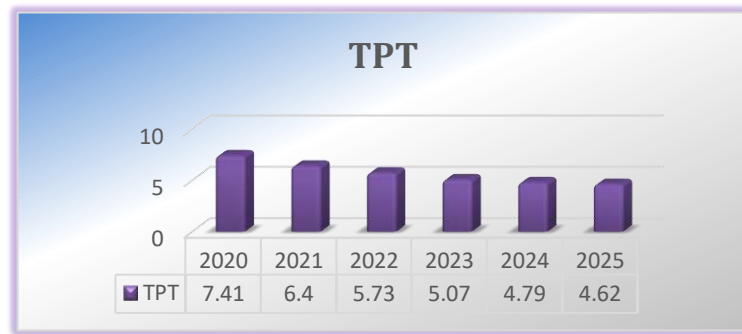
Permasalahan pembangunan perkotaan yang sangat krusial dewasa ini adalah masih banyaknya pengangguran. Pemerintah daerah harus hadir dan mampu membuka kesempatan kerja seluas-luasnya untuk masyarakatnya.

Kota Lubuk Linggau yang letak geografisnya dikelilingi daerah Kabupaten/Kota sekitar dengan perkembangan pembangunan yang cukup baik menjadi magnet tersendiri bagi penduduk luar daerah untuk mendapatkan pekerjaan, hal ini tentunya berpengaruh terhadap kesempatan kerja penduduk Kota Lubuk Linggau.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Lubuk Linggau dalam menghadapi permasalahan ini seperti kebijakan penerimaan tenaga kerja daerah yang mewajibkan seluruh investor untuk mempekerjakan tenaga kerja lokal sebesar 60 persen dari porsi karyawannya, pelaksanaan *job fair* dan juga peningkatan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi pada Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan.

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian sasaran ini ditentukan dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), hal ini menggambarkan seberapa besar jumlah pengangguran yang ada dibandingkan dengan angkatan kerja.

Pada tahun 2025 sasaran ini tidak berhasil tercapai, dimana dari target yang ditetapkan sebesar 4,62% terealisasi belum rilis sehingga capaiannya akhirnya belum dapat dihitung.



Gambar 3.5 Target pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka

8. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, menggunakan indikator Indeks Pengeluaran, yang menggambarkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa, ini menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati penduduk sebagai dampak dari meningkatnya perekonomiannya.

Pada tahun 2025 Indeks Pengeluaran penduduk Kota Lubuk Linggau tidak berhasil tercapai dengan realisasi sebesar 0,77 dari target yang ditetapkan sebesar 0,55 sehingga capaiannya hanya sebesar 71,43%.

Sasaran ini akan terus ditingkatkan guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Lubuk Linggau, yang pada akhirnya akan berdampak terhadap penurunan Angka Kemiskinan.

9. Menurunnya Tingkat Kemiskinan

Untuk mengukur keberhasilan sasaran ini dilakukan melalui 3 Indikator yaitu Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1), Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) dan Angka Kemiskinan.

Tingkat Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, semakin tinggi nilai indeks semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Tingkat Keparahan Kemiskinan adalah gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin yang berarti Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Pada tahun 2025 realisasi Indikator Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1), Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) dan Angka Kemiskinan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2 Realisasi Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1), Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) dan Angka Kemiskinan

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,45	1,1	131,82	Tercapai
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)	0,23	0,16	143,75	Tercapai
3	Angka Kemiskinan	12,23	10,49	116,59	Tercapai

10. Menguatnya Ketahanan Pangan Daerah

Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan.

Pemerintah Kota Lubuk Linggau ingin memastikan bahwa daerah memiliki ketahanan pangan yang cukup untuk keberlangsungan pembangunan daerah dengan memantapkan sasaran penguatan ketahanan pangan daerah. Untuk mengukur keberhasilan sasaran ini, dilakukan dengan indikator Rasio Kecukupan Pangan, hal ini menggambarkan rasio ketersediaan komoditas pangan dengan kebutuhan komoditas pangan.

Tahun 2025 sasaran ini dengan indikator Rasio Kecukupan Pangan tidak berhasil tercapai, dimana dari target sebesar 1,16

realisasinya adalah belum rilis sehingga capaiannya akhirnya belum dapat dihitung.

Sasaran 8 sampai dengan sasaran 11 di atas merupakan upaya dalam rangka mencapai tujuan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial lima tahun mendatang yang keberhasilannya diukur dengan indikator Angka Kemiskinan. Dalam periode jangka menengah target penurunan angka kemiskinan di Kota Lubuk Linggau dapat dilihat di bawah ini:



Gambar 3.6 Target penurunan angka kemiskinan di Kota Lubuk Linggau

11. Meningkatnya Infrastruktur Perumahan dan Permukiman

Sasaran ini diukur dengan indikator Luas Kawasan Kumuh, dimana pada tahun 2025 sasaran ini tidak berhasil tercapai dengan capaian di atas 60,71 dimana dari target sebesar 412,8 Ha terealisasi hanya sebesar 250,63 Ha.

12. Meningkatnya Infrastruktur Dasar

Pembangunan infrastruktur dasar yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Lubuk Linggau semakin menjadikan Kota Lubuk Linggau berkembang. Sebagai kota terbesar kedua setelah Kota Palembang yang merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan Kota Lubuk Linggau terus melakukan pembangunan pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat.

Pembangunan infrastruktur dasar ini diharapkan dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Kota Lubuk Linggau. Untuk mengukur keberhasilan sasaran ini dilakukan dengan indikator Persentase Infrastruktur sesuai SPP (Standar Pelayanan Perkotaan), hal ini menggambarkan seberapa banyak infrastruktur yang telah dibangun memenuhi standar pelayanan perkotaan.

Pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator Indeks Infrastruktur Dasar Perkotaan. Pada tahun 2025 sasaran ini tidak berhasil tercapai dengan capaian sebesar 97,71% dimana dari target yang ditetapkan sebesar 67,67% terealisasi sebesar 66,12%.

13. Meningkatnya Pengembangan Wilayah

Untuk mengukur keberhasilan sasaran ini dilakukan melalui indikator Indeks Aksesibilitas dimana pada tahun 2025 dari target yang ditetapkan sebesar 0,808 tidak berhasil tercapai dengan realisasi hanya sebesar 0,581, dengan capaian hanya sebesar 71,95%.

14. Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup

Pelaksanaan pembangunan tidak boleh mengesampingkan keberlangsungan ekosistem dan lingkungan, kualitas lingkungan hidup harus tetap terjaga dan harus ditingkatkan lagi kualitasnya.

Sasaran ini diukur dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), indikator ini merupakan indikator komposit dari 3 komponen utama yaitu Kualitas Air, Kualitas Udara dan Tutupan Lahan.

Pada tahun 2025 IKLH berhasil tercapai di atas 100% yang mana dari target yang ditetapkan sebesar 68,37 terealisasi sebesar 75,33.

Sasaran 12 sampai dengan sasaran 15 di atas merupakan upaya dalam rangka mencapai tujuan Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Perkotaan.

15. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas penyelenggaraan pemerintahan tidak terlepas dari bagaimana pelayanan publik dilakukan dan bagaimana kepuasan pelayanan yang diterima oleh masyarakat penerima layanan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Lubuklingau, pemerintah daerah berupaya terus melakukan perbaikan mulai dari pemenuhan standar pelayanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran ini dilakukan melalui 2 indikator yaitu Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat.

Realisasi 2 indikator kinerja ini pada tahun 2025 dicapai sebagai berikut:

Tabel 3.3 Realisasi Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,57	4,70	102,84	Tercapai
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,25	83,81	100,68	Tercapai

16. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel

Reformasi birokrasi merupakan sebuah keharusan dewasa ini, kinerja penyelenggaraan pemerintahan harus terukur, beroorientasi hasil dan memiliki dampak terhadap pembangunan daerah. Anggaran yang dipakai dalam penyelenggaraan pemerintahan bukan saja harus mampu dipertanggungjawabkan

secara benar tetapi harus memiliki hasil yang nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi pekerjaan rumah Kepala Daerah diberbagai pelosok negeri yang tentu saja memiliki berbagai kendala baik dari luar maupun dari dalam pemerintahan itu sendiri.

Untuk mengukur sasaran ini dilakukan melalui indikator Tingkat Akuntabilitas Pemerintah Daerah dimana pada tahun 2025 berhasil tercapai dimana dari target nilai BB yang ditetapkan, Pemerintah Kota Lubuk Linggau memperoleh nilai BB.

Pencapaian ini dilakukan dengan upaya yang masif terhadap peningkatan kualitas implementasi SAKIP secara terintegrasi pada setiap Perangkat Daerah. Selain itu hal yang paling menentukan adalah Komitmen Kepala Daerah untuk menerapkan Manajemen Kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka percepatan peningkatan implementasi SAKIP di Kota Lubuk Linggau:

1. Peningkatan Kapasitas Tim SAKIP Daerah;
2. Peningkatan Kapasitas Kepala Perangkat Daerah dan Petugas SAKIP Perangkat Daerah;
3. Publikasi Kinerja setiap Kepala Perangkat Daerah;
4. Peningkatan Kapasitas Evaluator Internal AKIP;
5. Perbaikan kualitas dokumen;
6. Integrasi Perencanaan dan Penganggaran (Performance base Budgeting) melalui Integrasi E-Planning dan E-Budgeting.

17. Meningkatnya Kapasitas Birokrasi

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui Indikator Indeks Kapasitas Birokrasi, hal ini menggambarkan kinerja birokrasi Pemerintah Daerah yang terdiri dari Indeks Komposit yang terdiri dari :

1. Indeks Profesionalitas;
2. Indeks Kelembagaan;
3. Indeks SPBE;
4. Indeks KIP;
5. Indeks Arsip;
6. Persentase harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Pencapaian sasaran ini untuk tahun 2025 tidak berhasil tercapai, akan tetapi capaiannya sangat tinggi yaitu sebesar 99,88% dimana dari target yang ditetapkan sebesar 69,08 dan terealisasi sebesar 69.

Sasaran 16 sampai dengan sasaran 18 di atas merupakan upaya dalam rangka mencapai tujuan Mewujudkan Reformasi Birokrasi. Evaluasi penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau untuk pertama kalinya dilakukan pada tahun 2018 oleh Kementerian PAN dan RB RI, dimana Indeks Reformasi Birokrasi secara real akan dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB RI.

3.3. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TERHADAP TAHUN SEBELUMNYA DAN AKHIR PERIODE JANGKA MENENGAH

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Pemerintah Kota Lubuk Linggau dengan Tahun Sebelumnya dan Periode Jangka Menengah Daerah

NO	Indikator Kinerja Utama		Satuan	2024			2025			PENCAPAIAN AKHIR PERIODE RPJMD
				Target	Realiasi	Capaian (%)	Target	Realiasi	Capaian (%)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	12
1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat									
	1	Indeks Pengetahuan	Indeks	0,709	0,712	100,42	0,711	0,724	101,83	Tercapai
2	Meningkatnya kualitas kesehatan									
	2	Indeks Kesehatan	Indeks	0,773	0,846	109,44	0,777	0,853	109,81	Tercapai
3	Terwujudnya iklim usaha dan investasi yang kondusif									
	4	Nilai ICOR	Nilai	8,672	9,3	107,24	8,484	8,24	97,12	Tercapai
4	Meningkatnya nilai PDRB sektor perdagangan dan jasa									
	5	PDRB sektor perdagangan dan jasa	Rp (Miliar)	2.132,65	2.340,42	109,74	2.178,88	2.487,48	114,16	Tercapai
5	Meningkatnya pertumbuhan industry									
	6	Laju pertumbuhan sektor industri terhadap PDRB	%	6,52	1,36	20,86	7,59	7,21	94,99	Tidak tercapai
6	Meningkatnya pengembangan pariwisata									
	7	Kontribusi pariwisata terhadap PDRB	%	4,04	5,05	125,00	4,11	5,4	131,39	Tercapai

7	Menurunnya pengangguran									
	8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,79	5,29	89,56	4,62	Belum Rilis	Belum Rilis	Tidak tercapai
9	Meningkatnya daya beli masyarakat									
	9	Indeks Pengeluaran	Indeks	0,74	0,008	1,08	0,77	0,55	71,43	Tidak tercapai
10	Menurunnya tingkat kemiskinan									
	10	Indeks kedalaman kemiskinan (P1)	Indeks	1,47	1,43	102,72	1,45	1,1	131,82	Tercapai
	11	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Indeks	0,24	0,28	83,33	0,23	0,16	143,75	Tercapai
	12	Angka Kemiskinan	%	12,35	11,14	109,80	12,23	10,49	116,59	Tercapai
11	Menguatnya ketahanan pangan daerah									
	13	Rasio kecukupan pangan	Rasio	1,09	1	91,74	1,16	Belum Rilis	Belum Rilis	Tidak tercapai
12	Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman									
	14	Luas Kawasan Kumuh	Ha	413,87	314,42	124,03	412,8	250,63	60,71	Tercapai
13	Meningkatnya infrastruktur dasar									
	15	Indeks Infrastruktur Dasar Perkotaan	%	65,86	40,16	60,98	67,67	66,12*	97,71	Tidak tercapai
14	Meningkatnya pengembangan wilayah									
	16	Indeks Aksesibilitas	Indeks	0,793	0,581	73,27	0,808	0,581	71,95	Tidak tercapai
15	Terjaganya kualitas lingkungan hidup perkotaan									
	17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	67,46	71,83	106,48	68,37	75,33	110,18	Tercapai
16	Meningkatnya kualitas pelayanan publik									
	18	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4,4	4,44	100,91	4,57	4,70	102,84	Tercapai
	19	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,48	81,59	98,92	83,25	83,81	100,68	Tercapai

17	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel									
20	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai	BB	BB	100,00					Tercapai
18	Meningkatnya Kapasitas Birokrasi									
21	Indeks Kapasitas Birokrasi	Indeks	70,15	Belum Rilis	Belum Rilis					Tidak tercapai

3.4. PROGRAM PENUNJANG PENCAPAIAN KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Pemerintah Daerah yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama Daerah tentunya harus didukung dengan Program/Kegiatan yang selaras dengan Sasaran yang akan dicapai, dibawah ini merupakan Program penunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Pemerintah Kota Lubuk Linggau beserta realisasi setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing.

Tabel 3.5 Program Penunjang Pencapaian Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja

No	Indikator Kinerja Utama		Satuan	2025			Program /Kegiatan		Anggaran	Realisasi	(%)
				Target	Realiasi	Capaian					
						(%)					
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10
1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat										
	1	Indeks Pengetahuan	Indeks	0,711	0,724	101,83	1	Program Pengelolaan Pendidikan	68,971,970,356.00	54.176.469.263	90,04
							2	Program Pembinaan Perpustakaan	1,354,829,400.00	816.759.800	98,45
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas										
	2	Indeks Kesehatan	Indeks	0,773	0,846	109,44	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	73,068.957.751.00	20.442.368.873	87,41
							2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	909.543.712.00	3.152.318.111	51,08
							3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	27,342.000.00	65.552.500	28,10
							4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1,458,235.620.00	232.371.158	67,43
3	Terwujudnya iklim usaha dan investasi yang kondusif										
	4	Nilai ICOR	Nilai	8,672	9,3	107,24	1	Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi	423.394.000	421.001.000	99,43
							2	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	87.505.000	87505000	100,00
							3	Program pengendalian dan pengawasan penanaman modal	364.955.000	318.645.750	87,31
							4	Program peningkatan pelayanan perizinan terpadu	23.800.000	23.700.000	99,58
4	Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan dan Jasa										
	5	PDRB sektor Perdagangan dan Jasa	Rp (Milliar)	2.132,65	2.340,42	109,74	1	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting	89,600.00	165.557.140	91,02
							2	Program Pengembangan Ekspor	208,320.00	86.140.160	99,33
							3	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	29,034,140.00	34.252.112	39,50

							4	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	172,420,600.00	811.216.852	99,73
							5	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	33.805.000	33.805.000	100,00
5	Meningkatnya pertumbuhan industri										
	6	Laju pertumbuhan sektor industri terhadap PDRB	%	6,52	1,36	20,86	1	Program Pengembangan Kinerja Infrastruktur Kawasan Industri	0	0	
							2	Program Pengembangan sentra dan Klaster Industri	0	0	
6	Meningkatnya Pengembangan Pariwisata										
	7	Kontribusi pariwisata terhadap PDRB	%	4,04	5,05	125,00	1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	49,974,120.00	59.954.200	96,36
							2	Program Pemasaran Pariwisata	51,129,200.00	1.829.237.110	96,90
							3	Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	259,201,000.00	124.123.000	96,93
7	Menurunnya pengangguran										
	8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,79	5,29	89,56	1	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	346,610,810.00	158.753.072	88,55
							2	Program Penempatan Kerja	19,380,640.00	125.015.856	99,79
							3	Program Hubungan Industrial	68,082,440.00	165.386.974	97,77
							4	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	0	0	0
							5	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	79,810,340.00	48.104.100	80,72
							6	Program Pendidikan Dan Pelatihan Koperasi	58,480,400.00	112.147.736	83,63
							7	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	259,642,400.00	47.271.300	80,71
							8	Program Pengembangan UMKM	33,540,336.00	191.452.600	86,17
8	Meningkatnya daya beli masyarakat										
	9	Indeks Pengeluaran	Indeks	0,74	0,008	1,08	1	Program Peningkatan Hubungan Industrial	0	0	0

							2	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	0	0	0
9	Menurunnya tingkat kemiskinan										
	10	Indeks kedalaman kemiskinan (P1)	Indeks	1,47	1,43	102,72	1	Program Pemberdayaan Sosial	377,687,440.00	162.954.305	98,62
	11	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Indeks	0,24	0,28	83,33	2	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	26,110,000.00	133.251.000	91,29
	12	Angka Kemiskinan	%	12,35	11,14	109,80	3	Program Rehabilitasi Sosial	190,180,752.00	171.364.019	45,11
							4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	180,366,880.00	397.847.708	73,01
							5	Program Penanganan Bencana	284,216,512.00	249.318.750	79,30
							6	Program Keluarga Berencana	647.771.641	297.894.300	45,99
							7	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3,935,005,287.00	2.198.404.952	84,61
							8	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1,405,727,280.00	35.909.000	84,63
							9	Program Penanggulangan Bencana	92,629,000.00	781.271.500	86,89
							10	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Korban	2,476,800,000.00	2.761.416.665	97,02
							11	Program Pengembangan Perumahan	224,314,442.00	1.852.668.599	90,76
10	Menguatnya ketahanan pangan daerah										
	13	Rasio kecukupan pangan	Rasio	1,09	1	91,74	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	26,000,000.00	40.940.094	99,99
							2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	364,000,000.00	798.560.937	82,04
							3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	26,000,000.00	51.384.140	99,55
							4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	26,000,000.00	49.302.780	99,96
							5	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	721,217,000.00	358.710.574	46,40

							6	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	67,000,000.00	277.736.027	93,93
							7	Program Penyuluhan Pertanian	247.234.750	220.913.000	89,35
							8	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	332,406,389.00	662.798.085	93,20
							9	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	137,250,000.00	101.002.882	55,19
11	Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman										
	14	Luas Kawasan Kumuh	%	413,87	314,42	124,03	1	Program Kawasan Permukiman	1,000,000,000.00	24.552.079.161	83,90
12	Meningkatnya infrastruktur dasar										
	15	Indeks Infrastruktur Dasar Perkotaan	%	65,86	40,16	60,98	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	7,695,057,000.00	18.045.861.578	84,837
							2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2,637,185,554.00	1.195.653.900	96,133
							3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	8,992,436,000.00	33.157.488.784	93,725
							4	Program Penataan Bangunan Gedung	29,641,148,324.00	35.209.437.508	65,013
							5	Program Penataan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya	400,000,000.00	12.714.829.187	82,295
13	Meningkatnya Pengembangan Wilayah										
	16	Indeks Aksesibilitas	Indeks	0,793	0,581	73,27	1	Program Penyelenggaraan Jalan	132,891,423,332.00	153.326.421.331	51,31
							2	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	342,005,000.00	177.520.045	33,16
							3	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2,438,047,800.00	81.214.615	13,62
14	Terjaganya kualitas lingkungan hidup perkotaan										
	17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	67,46	71,83	106,48	1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	0	0	0
							2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	588,407,389.00	5.450.000	100,00
							3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	68,300,000.00	309.144.755	95,86

							4	Program Pengendalian B3 Limbah B3	44,120,956.00	3.399.4 90	97,49
							5	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH	10,169,800.00	23.092.150	64,81
							6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	12.210.850	11.530.050	94,42
							7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Bagi Masyarakat	5.581.000	4.852.200	86,94
							8	Program Pengelolaan Persampahan	13,620,904,611.00	5.009.446.088	99,77
15	Meningkatnya kualitas pelayanan publik										
	18	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4,4	4,44	100,91	1	Program Pendaftaran Penduduk	271,494,000.00	633.058.000	96,99
	19	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,48	81,59	98,92	2	Program Pencatatan Sipil	7,461,600.00	64.800.000	93,10
							3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	384,000,000.00	29.100.000	100,00
							4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik kec. Lubuklinggau Barat I	550,209,474.00	146.756.307	95,96
							5	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik kec. Lubuklinggau barat II	200,000,000.00	100.401.024	94,62
							6	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik kec. Lubuklinggau Timur I	375,998,400.00	109.810.429	87,43
							7	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik kec. Lubuklinggau Timur II	449,923,680.00	104.592.461	81,07
							8	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik kec. Lubuklinggau Utara I	428,688,200	144.824.510	95,99
							9	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik kec. Lubuklinggau Utara II	500,000,000.00	285.797.327	99,71
							10	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik kec. Lubuklinggau Selatan I	350,000,000.00	102.969.024	99,18

							11	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik kec. Lubuklinggau Selatan II	550,209,474.00	147.166.403	87,27
16	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel										
	20	Tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai	BB	BB	100	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	228.608.142	188.498.445	82,45
							2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	674,500,344.00	733.034.686	95,88
							3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	478,366,268.00	1.075.833.739	89,98
							4	Program Penyelenggaraan Pengawasan	498,511,000.00	1.551.402.000	99,15
							5	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	259,268,000.00	391.628.213	99,55
							6	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,327,285,200.00	1.307.552.481	85,14
							7	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	51,214,101,306.00	3.663.329.862	89,08
17	Meningkatnya Kapasitas Birokrasi										
	21	Indeks Kapasitas Birokrasi	Indeks	69,08	69	99,88	1	Program Pengelolaan Arsip	49.559.930	48.828.030	98,52
							2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1,108,121,032.00	2.256.617.745	98,45
							3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1,019,236,800.00	8.400.125.146	68,31
							4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	1.444.201.315	1.444.201.315	97,25
							5	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPR	17,679,863,800.00	8.673.823.862	80,11
							6	Program Kepegawaian Daerah	747,743,352.00	1.580.467.645	95,74
							7	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,186,685,960.00	2.329.887.775	100,00
									648.907.29.304.00	425.544.370.793	87,20

Catatan:

- *Data realisasi keuangan pada setiap Program merupakan data sementara yang sedang dilakukan audit oleh BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan*

3.5. REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.6 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%
PENDAPATAN DAERAH	1.386.584.092.480,29	1.168.703.482.595,88	84,28
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	176.947.559.956,57	163.775.509.553,72	92,55
Pajak Daerah	97.862.909.149,13	83.021.702.338,00	84,83
Retribusi Daerah	7.412.400.000,00	5.137.793.587,00	69,31
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.201.674.757,44	2.201.674.757,44	100,00
Lain-lain PAD yang Sah	69.470.576.050,00	73.414.338.871,28	105,67
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.386.584.092.480,29	163.775.509.553,72	92,55
PENDAPATAN TRANSFER	1.209.636.532.523,72	1.004.927.973.042,16	83,07
Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0,00	0,00	0,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0,00	0,00	0,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	824.247.471.000,00	792.320.255.666,00	96,12
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00
Insentif Fiskal	7.945.124.000,00	7.945.124.000,00	100,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	7.945.124.000,00	7.945.124.000,00	100,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	337.443.937.523,72	204.662.593.376,16	54,22
Pendapatan Bagi Hasil	83.380.083.879,00	65.286.665.567,00	78,30
Bantuan Keuangan	227.926.371.271,00	139.375.927.809,16	47,39
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	377.443.937.523,72	204.662.593.376,16	54,22
TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	1.209.636.532.523,72	1.044.927.973.042,16	83,07
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	69.470.576.050,00	73.414.338.871,28	105,67
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	69.470.576.050,00	73.414.338.871,28	105,67
JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	69.470.576.050,00	73.414.338.871,28	105,67
JUMLAH PENDAPATAN	1.413.034.479.157,00	1.168.703.482.595,88	84,28
BELANJA DAERAH	1.358.724.765.579,22	1.122.481.491.090,36	82,61
BELANJA OPERASI	820.481.986.175,09	765.964.315.321,83	93,35
Belanja Pegawai	423.421.793.386,95	408.413.563.121,33	96,45
Belanja Barang dan Jasa	360.321.543.023,00	325.116.444.413,50	90,22

Belanja Bunga	3.014.125.388,00	2.814.125.387,00	93,36
Belanja Hibah	32.664.524.377,14	28.620.182.400,00	87,61
Belanja Bantuan Sosial	1.060.000.000,00	1.000.000.000,00	94,33
JUMLAH BELANJA OPERASI	820.481.986.175,09	765.964.315.321,83	93,35
BELANJA MODAL	523.470.961.404,13	355.083.824.968,53	66,68
Belanja Modal Tanah	237.384.064,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.145.005.472,00	46.360.621.155,00	81,12
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	129.449.261.036,14	69.093.095.955,64	53,37
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	338.687.544.403,99	232.781.715.239,89	68,73
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.561.800.178,00	6.458.426.368,00	98,42
Belanja Modal Aset Lainnya	389.966.250,00	389.966.250,00	100,00
JUMLAH BELANJA MODAL	532.470.961.404,13	355.083.824.968,53	66,68
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.771.818.000,00	1.433.350.800,00	24,83
Belanja Tidak Terduga	5.771.818.000,00	1.433.350.800,00	24,83
JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	5.771.818.000,00	1.433.350.800,00	24,83
JUMLAH BELANJA	1.358.724.765.579,22	1.122.481.491.090,36	82,61
SURPLUS/DEFISIT	27.859.326.901,07	46.221.991.505,52	165,91
PEMBIAYAAN DAERAH	(27.859.326.901,07)	(27.839.326.901,07)	99,92
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	3.170.306.322,93	3.170.306.322,93	100,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3.170.306.322,93	3.170.306.322,93	100,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	3.170.306.322,93	3.170.306.322,93	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	31.029.633.224,00	31.009.633.224,00	99,93
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	31.029.633.224,00	31.009.633.224,00	99,93
PEMBIAYAAN NETTO	(27.859.326.901,07)	(27.839.326.901,07)	99,92
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	18.382.664.604,45	0,00

Sumber : BPKAD Pemerintah Kota Lubuk Linggau (unaudited)

Bab 4

Penutup



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kota Lubuk Linggau berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2025 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Nilai SAKIP Kota Lubuk Linggau tahun 2025 mendapatkan nilai dengan kategori “BB”, hal tersebut menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan orientasi penyelenggaraan pemerintahan pada hasil, serta efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya pada Pemerintah Kota Lubuk Linggau sangat baik. Diharapkan kualitas penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau kedepan semakin baik dan kinerja Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat.

Pada tahun 2025 berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis terhadap 4 (empat) misi dengan 6 (enam) tujuan yang terdiri dari 18 (delapan belas) sasaran strategis yang didukung 25 (dua puluh lima) indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD, sebanyak 12 indikator dalam kategori berhasil tercapai, 8 indikator tidak berhasil tercapai dan 4 belum rilis.

Keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja telah dilakukan analisis dan evaluasi sehingga diketahui langkah-langkah strategis yang harus dilaksanakan dalam meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya. Demikian halnya koordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait akan terus ditingkatkan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Lubuk Linggau yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Lubuk Linggau yang menggambarkan Capaian Kinerja tiap-tiap Tujuan dan Sasaran pada tahun 2025 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Lubuk Linggau.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU



**LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS IMPLEMENTASI SAKIP (LKjIP) PD
PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU
TAHUN 2025**

**INSPEKTORAT
KOTA LUBUK LINGGAU
TAHUN 2026**



PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU INSPEKTORAT

Jl. Depati Said No.48 Ulak Lebar Lubuk Linggau Kode Pos 31625
Telp. (0733) 320633 Faksime : (0733) 320633
Pos-el: inspektorat@LubukLinggau.go.id, Laman : www.LubukLinggau.go.id

Lubuk Linggau, 30 Maret 2026

Nomor : 700/ /Insp/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Kompilasi Hasil Evaluasi atas
Implementasi SAKIP pada PD Tahun
2025 Di Lingkungan Pemerintah Kota
Lubuk Linggau

Yth.
Wali Kota Lubuk Linggau
di _
Lubuk Linggau

Dengan ini kami sampaikan Laporan Kompilasi Hasil Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Perangkat Daerah Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau, dengan pokok-pokok bahasan sebagai berikut :

BAB I : SIMPULAN DAN REKOMENDASI
BAB II : URAIAN HASIL EVALUASI
BAB III : PENUTUP



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta penilaian implementasi Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau dan Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 29 Tahun 2024 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota, maka Inspektorat Kota Lubuk Linggau telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.

Tim Evaluasi LKjIP telah melakukan evaluasi terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja yang ada pada LKjIP dan dokumen pendukung meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Bobot penilaian untuk masing-masing komponen terdiri dari Perencanaan Kinerja 30%, Pengukuran Kinerja 30%, Pelaporan Kinerja 15% dan Evaluasi Kinerja 25%.

Hasil evaluasi Implementasi AKIP unit kerja sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau tahun 2024 terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal. Penilaian menggunakan seperangkat kriteria penilaian untuk setiap butir penilaian sub komponen manajemen kinerja dan dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi.

Berdasarkan akumulasi penilaian evaluasi terhadap Implementasi AKIP Tahun 2024 pada 39 (tiga puluh sembilan) PD di lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau memperoleh nilai rata-rata sebesar 72,25 (tujuh puluh dua koma dua lima) dengan kategori "Sangat Baik". Penilaian hasil evaluasi tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 73,11 (tiga puluh tiga koma sebelas).

Dari hasil implementasi SAKIP di 39 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau, kami telah memberikan rekomendasi perbaikan untuk implementasi SAKIP. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diperbaiki, yaitu :

1. Sesuai dengan Format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah diwajibkan dalam Laporan Kinerja (LKJIP) menyajikan informasi tentang :

- Dokumen Laporan Kinerja agar dipublikasikan melalui website resmi Perangkat Daerah/Pemerintah Kota Lubuk Linggau;
- Penyajian Capaian Kinerja pada Laporan Kinerja harus menyajikan perbandingan realisasi kinerja tahun yang bersangkutan dengan Renstra dan Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- Perangkat Daerah untuk lebih teliti dalam menginfokan kebutuhan utama atas kinerja yang telah ditetapkan sehingga tetap sasaran dalam pencapaiannya;
- Perangkat Daerah untuk melampirkan PK dari Eselon III untuk melihat apakah sudah selaras dengan PK Kepala Dinas yang bersangkutan;
- Laporan Kinerja harus memuat Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada Perangkat Daerah terkait;
- Menyempurnakan Penyusunan informasi dalam LKJIP agar menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi Outcome;
- LKJIP harus menyajikan informasi perbandingan target selama 5 (lima) tahun /jangka menengah beserta realisasi yang telah dicapai sampai dengan tahun berjalan;
- Laporan Kinerja agar menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/ internasional (Benchmark Kinerja);

- Pengumpulan data kinerja agar memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) dengan berkoordinasi lagi pada Sekretariat Daerah bagian Organisasi untuk mengaktifkan Aplikasi yang telah ada (E-Sakip);
 - Pengukuran capaian kinerja agar memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) dengan berkoordinasi lagi pada Sekretariat Daerah bagian Organisasi untuk mengaktifkan Aplikasi yang telah ada (E-Sakip);
 - Dokumen Laporan Kinerja agar menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja);
 - Diharapkan PD untuk lebih Teliti dalam menganalisis dan menyajikan serta menerapkan Pengukuran Kinerja dalam penyesuaian strategi dan kebijakan untuk mencapai kinerja yang ditetapkan;
 - Diharapkan PD lebih teliti dalam membuat Dokumen Perencanaan Kinerja dan PK yang saling berhubungan dengan selaras antara kondisi yang akan dihadapi dan hasil yang akan dicapai; dan
 - Melaksanakan tindak lanjut atas evaluasi dari tahun sebelumnya.
2. Seluruh tujuan pada Dokumen Renstra harus disertai dengan penetapan indikator dari tujuan tersebut;
 3. Melakukan reviu secara berkala pada dokumen RENSTRA, IKU, Rencana Aksi, PK dan LKJIP diharapkan untuk direviu ulang bersama pihak yang terkait untuk mendapatkan hasil yang lebih baik serta dituangkan kedalam dokumen yang menyatakan bahwa dokumen-dokumen tersebut telah direviu;
 4. Diharapkan PD berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah Bagian Organisasi dan Hukum untuk menetapkan peraturan Wali Kota Lubuk Linggau tentang Pengumpulan data Kinerja dan Pengukuran Data Kinerja agar bisa digunakan oleh semua PD yang ada di lingkungan Kota Lubuk Linggau;
 5. Menyusun Pedoman/SOP yang jelas tentang mekanisme monitoring renstra secara periodik, dan belum ada tindak lanjut atas hasil monitoring, serta belum adanya dokumentasi hasil monitoring / capaian kinerja jangka menengah dilaporkan progressnya dalam laporan kinerja;
 6. Menyusun SOP atau pedoman terkait penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional yang didasari dengan pengukuran kinerja;
 7. Menyelaraskan nomenklatur sasaran dan indikator kinerja antara Perjanjian Kinerja dan SKP;

8. Untuk melakukan pembuatan website/mengaktifkan website khusus Perangkat Daerah terkait atau bisa dipublikasikan melalui website Pemerintah Kota sehingga dokumen-dokumen terkait bisa dipublikasikan untuk menuju lebih transparan.

Demikian disampaikan ikhtisar hasil evaluasi implementasi SAKIP pada PD di Lingkungan Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 Tahun Anggaran 2026. Kami menghargai segala upaya pimpinan PD dan beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan unit kerjanya.

Hal-hal yang menjadi perhatian diatas perlu mendapat perbaikan dan dijadikan sebagai acuan dalam penyampaian Dokumen LKjIP selanjutnya.

Lubuk Linggau, Maret 2026
INSPEKTUR KOTA LUBUK LINGGAU,


Drs. ERWIN ARMEIDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 1970053199003 1 002

BAB I

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. SIMPULAN

Berdasarkan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025, diperoleh simpulan bahwa implementasi AKIP di lingkungan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau untuk Tahun 2025 secara keseluruhan (gabungan) memperoleh nilai rata-rata sebesar 72,25 (tujuh puluh dua koma dua lima) dengan kategori "Sangat Baik"(BB). Berdasarkan hasil penilaian pencapaian per komponen implementasi sistem akuntabilitas kinerja sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi diperoleh nilai 24,31% dari nilai bobot maksimum 30% yaitu nilai keseluruhan hasil penilaian atas pencapaian dari pemenuhan dokumen, kualitas, implementasi perencanaan strategis unit kerja, dan pemenuhan dokumen, kualitas, implementasi perencanaan kinerja tahunan.

2. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi diperoleh nilai 22,24% dari nilai bobot maksimum 30% yaitu nilai pencapaian keseluruhan hasil penilaian dari pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran dan implementasi pengukuran kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi diperoleh nilai 10,24% dari nilai bobot maksimum 15% yaitu nilai pencapaian keseluruhan hasil penilaian dari pemenuhan pelaporan, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan informasi kinerja.

4. Evaluasi Internal

Hasil evaluasi diperoleh nilai 15,26% dari nilai bobot maksimum 25% yaitu nilai pencapaian keseluruhan hasil penilaian dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi dan pemanfaatan evaluasi internal.

Dari evaluasi atas implementasi SAKIP PD di lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau Tahun 2026, masih dijumpai hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan oleh setiap PD.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan evaluasi di atas, sebagai bahan pertimbangan untuk penyempurnaan dan peningkatan dalam mengimplementasi SAKIP Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau adalah agar Pimpinan SKPD melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah diwajibkan dalam Laporan Kinerja (LKjIP) menyajikan informasi tentang :
 - Dokumen Laporan Kinerja agar dipublikasikan melalui website resmi Perangkat Daerah/Pemerintah Kota Lubuk Linggau;
 - Penyajian Capaian Kinerja pada Laporan Kinerja harus menyajikan perbandingan realisasi kinerja tahun yang bersangkutan dengan Renstra dan Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 - Perangkat Daerah untuk lebih teliti dalam menginfokan kebutuhan utama atas kinerja yang telah ditetapkan sehingga tetap sasaran dalam pencapaiannya;
 - Perangkat Daerah untuk melampirkan PK dari Eselon III untuk melihat apakah sudah selaras dengan PK Kepala Dinas yang bersangkutan;
 - Laporan Kinerja harus memuat Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada Perangkat Daerah terkait;
 - Menyempurnakan Penyusunan informasi dalam LKJIP agar menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi Outcome;

- LKjIP harus menyajikan informasi perbandingan target selama 5 (lima) tahun / jangka menengah beserta realisasi yang telah dicapai sampai dengan tahun berjalan;
 - Laporan Kinerja agar menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja);
 - Pengumpulan data kinerja agar memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) dengan berkoordinasi lagi pada Sekretariat Daerah bagian Organisasi untuk mengaktifkan Aplikasi yang telah ada (E-Sakip);
 - Pengukuran capaian kinerja agar memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) dengan berkoordinasi lagi pada Sekretariat Daerah bagian Organisasi untuk mengaktifkan Aplikasi yang telah ada (E-Sakip);
 - Dokumen Laporan Kinerja agar menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja);
 - Diharapkan PD untuk lebih Teliti dalam menganalisis dan menyajikan serta menerapkan Pengukuran Kinerja dalam penyesuaian strategi dan kebijakan untuk mencapai kinerja yang ditetapkan;
 - Diharapkan PD lebih teliti dalam membuat Dokumen Perencanaan Kinerja dan PK yang saling berhubungan dengan selaras antara kondisi yang akan dihadapi dan hasil yang akan dicapai; dan
 - Melaksanakan tindak lanjut atas evaluasi dari tahun sebelumnya.
2. Seluruh tujuan pada Dokumen Renstra harus disertai dengan penetapan indikator dari tujuan tersebut;
 3. Melakukan reviu secara berkala pada dokumen RENSTRA, IKU, Rencana Aksi, PK dan LKjIP diharapkan untuk direviu ulang bersama pihak yang terkait untuk mendapatkan hasil yang lebih baik serta dituangkan kedalam dokumen yang menyatakan bahwa dokumen-dokumen tersebut telah direviu;
 4. Diharapkan PD berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah Bagian Organisasi dan Hukum untuk menetapkan peraturan Wali Kota Lubuk Linggau tentang Pengumpulan data Kinerja dan Pengukuran Data Kinerja agar bisa digunakan oleh semua PD yang ada di lingkungan Kota Lubuk Linggau;

5. Menyusun Pedoman/SOP yang jelas tentang mekanisme monitoring renstra secara periodik, dan belum ada tindak lanjut atas hasil monitoring, serta belum adanya dokumentasi hasil monitoring / capaian kinerja jangka menengah dilaporkan progressnya dalam laporan kinerja;
6. Menyusun SOP atau pedoman terkait penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional yang didasari dengan pengukuran kinerja;
7. Menyelaraskan nomenklatur sasaran dan indikator kinerja antara Perjanjian Kinerja dan SKP; dan
8. Untuk melakukan pembuatan website/mengaktifkan website khusus Perangkat Daerah terkait atau bisa dipublikasikan melalui website Pemerintah Kota sehingga dokumen-dokumen terkait bisa dipublikasikan untuk menuju lebih transparan.

BAB II

URAIAN HASIL EVALUASI

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum dilaksanakannya evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada PD di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota;

B. Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Walikota selaku Pimpinan Instansi Pemerintah perlu mengetahui sampai seberapa jauh pengaruh implementasi Sistem AKIP terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah pada PD di lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau, sebagaimana yang diharapkan melalui program-program prioritas yang ditetapkan. Untuk mencapai maksud tersebut, pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi sebagai bagian yang *inherent* dengan Sistem AKIP haruslah direncanakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP memerlukan berbagai pengetahuan tidak hanya masalah yang terkait dengan penerapan sistem AKIP saja, akan tetapi juga tantangan untuk menguasai berbagai metode dan teknik yang dapat digunakan dalam evaluasi. Oleh karena begitu banyak dan luasnya metode yang bisa diterapkan dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, maka para evaluator diharapkan dapat memahami dan menguasai berbagai metode dan teknik itu. Dalam melakukan perencanaan evaluasi ini disamping dijumpai kesulitan pada tingkat pelaksanaan, juga dijumpai dilema antara melakukan evaluasi yang ideal dengan sumber daya yang tersedia. Tugas evaluasi atas implementasi SAKIP ini juga memerlukan keahlian teknis dalam mengevaluasi dan mengelola pekerjaan evaluasi itu sendiri.

Hasil akhir evaluasi selanjutnya disampaikan secara formal melalui surat disertai dengan pemeringkatan (*rating*) hasil evaluasi. PD tentu harus melakukan berbagai perbaikan yang mendasar secara terus menerus. Beberapa instansi yang memperoleh predikat nilai baik diharapkan diberi penghargaan. Tujuannya secara manajerial adalah untuk memberikan motivasi agar terus melakukan perbaikan dan bisa dijadikan contoh bagi instansi lainnya.

C. Tujuan Evaluasi

Tujuan dilaksanakannya evaluasi atas implementasi AKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) PD di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau sebagai berikut :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi AKIP;
2. Menilai tingkat implementasi AKIP PD di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau;
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan implementasi AKIP PD di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau;
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Hasil dari evaluasi tersebut digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik di instansi masing-masing secara berkelanjutan

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi meliputi :

1. Evaluasi terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan
4. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

E. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada PD dengan menggunakan teknik "*criteria referenced survey*" dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pada awal evaluasi terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kami menetapkan beberapa kriteria umum yang digunakan sebagai standar umum evaluasi sesuai dengan Petunjuk Teknis Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota

Lubuk Linggau. Kriteria tersebut meliputi lima komponen yang terdapat dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Sedangkan dalam pelaksanaan evaluasi terhadap capaian kinerja, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif terhadap analisis capaian kinerja sasaran dan indikator kinerja yang terdapat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada masing-masing PD.

F. Gambaran Umum Evaluatan

Laporan atas Implementasi AKIP yang akan dievaluasi pada Tahun 2025 meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2024 beserta dokumen perencanaan terkait pada 39 PD di lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau yang terdiri dari 2 Sekretariat, 1 Inspektorat, 5 Badan, 23 Dinas dan 8 Kecamatan yaitu :

- 1) Sekretariat Daerah
- 2) Sekretariat DPRD
- 3) Inspektorat
- 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
- 5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian & Pengembangan
- 6) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- 7) Badan Pendapatan Daerah
- 8) Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
- 9) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
- 10) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 11) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 12) Dinas Perhubungan
- 13) Dinas Ketenagakerjaan
- 14) Dinas Pariwisata
- 15) Dinas Ketahanan Pangan
- 16) Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana
- 17) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
- 18) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

- 19) Dinas Kesehatan
- 20) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- 21) Dinas Sosial
- 22) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 23) Dinas Pertanian
- 24) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
- 25) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
- 26) Satuan Polisi Pamong Praja
- 27) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 28) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
- 29) Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
- 30) Dinas Perikanan
- 31) Dinas Lingkungan Hidup
- 32) Kecamatan Lubuk Linggau Barat I
- 33) Kecamatan Lubuk Linggau Barat II
- 34) Kecamatan Lubuk Linggau Timur I
- 35) Kecamatan Lubuk Linggau Timur II
- 36) Kecamatan Lubuk Linggau Utara I
- 37) Kecamatan Lubuk Linggau Utara II
- 38) Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I
- 39) Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II

G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

SAKIP merupakan instrumen pertanggungjawaban yang pada pokoknya terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta misi organisasi. Implementasi SAKIP pada PD di lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau tertuang dalam dokumen-dokumen utama SAKIP yaitu :

- a. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025;
- b. Rencana Strategis 2024-2026;

- c. Rencana Kinerja dan Revisi Rencana Kinerja Tahun 2025;
- d. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025;
- e. Indikator Kinerja Utama Tahun 2025;
- f. Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
- g. DPA/SIPD Induk dan Perubahan Tahun 2025;
- h. Laporan Monev TW I, II, III dan IV Tahun 2025;
- i. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2025;
- j. Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri (LKE-PM);
- k. Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri (LHE-PM);
- l. Tindak lanjut dari LHE tahun sebelumnya (Tahun 2024).

H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil pelaksanaan evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) PD Tahun 2025, secara umum terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perbaikan oleh masing-masing PD. Sebagian telah dilaksanakan oleh PD, namun masih ada rekomendasi yang belum dilaksanakan sepenuhnya oleh PD. Hal ini menjadi catatan dalam penilaian Evaluasi atas Implementasi AKIP Tahun 2025 dan akan direkomendasikan kembali untuk diperbaiki pada tahun mendatang sebagai berikut:

1. Penyajian Capaian Kinerja pada Laporan Kinerja harus menyajikan perbandingan realisasi kinerja tahun yang bersangkutan dengan Renstra dan Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
2. Pemantauan Rencana Aksi agar terus dilaksanakan dan ditingkatkan dalam rangka mengendalikan kinerja sehingga memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja organisasi instansi pemerintah;
3. Seluruh tujuan pada Dokumen Renstra harus disertai dengan penetapan indikator dari tujuan tersebut;

4. Laporan Kinerja seharusnya menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya sesuai dengan Format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Melakukan monitoring target kinerja sesselon III dan IV;
6. Membuat pedoman untuk pengumpulan data kinerja dan pengukuran data kinerja;
7. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja sebaiknya dilakukan secara berkala sehingga data kinerja yang disajikan dapat diandalkan;
8. Menyusun rencana aksi atas target kinerja secara berkala (triwulan) yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja. Rencana Aksi berupa target-target kinerja yang harus dipantau secara periodik.
9. Laporan kinerja sebaiknya di reviu oleh atas yang berwenang pada masing-masing Perangkat Daerah;
10. Melakukan analisis efisiensi penggunaan sumber daya pengukuran kinerja;
11. Memberikan pelatihan kepada pegawai yang bertanggung jawab akan penyusunan laporan kinerja dari masing-masing Perangkat Daerah; dan
12. Terdapat beberapa Perangkat Daerah yang tidak melakukan perbaikan/ penyempurnaan pada laporan kinerja tahun berikutnya sesuai dengan hasil evaluasi laporan kinerja tahun lalu.

II. HASIL EVALUASI

Evaluasi atas implementasi SAKIP, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas internal. Evaluasi penerapan manajemen kinerja juga meliputi penerapan kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan indikator kinerja utama (IKU) sampai saat dilakukan evaluasi. Kriteria yang ditetapkan dalam rangka evaluasi SAKIP ini dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE). LKE ini menyajikan komponen, bobot, sub-komponen. LKE ini juga dilengkapi dengan seperangkat kriteria penilaian untuk setiap sub-komponen.

Hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 yang disajikan oleh masing-masing PD dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 s/d 100, yang selanjutnya diberikan "kategori peringkat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

- AA : >90 - 100 dengan kategori sangat memuaskan
- A : >80 - 90 dengan kategori memuaskan
- BB : >70 - 80 dengan kategori sangat baik
- B : >60 - 70 dengan kategori baik
- CC : >50 - 60 dengan kategori cukup
- C : >30 - 50 dengan kategori kurang
- D : 0 - 30 dengan kategori sangat kurang

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan terhadap dokumen LKjIP Tahun 2024 beserta dokumen terkait dari masing-masing PD, adapun hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Perangkat Daerah	LHE		
		NILAI	KATEGORI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	INSPEKTORAT	83,45	A	Memuaskan
2	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN KOTA LUBUKLINGGAU	82,85	A	Memuaskan
3	BAPPEDA LITBANG KOTA LUBUKLINGGAU	80,60	A	Memuaskan
4	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU	73,10	BB	Sangat Baik
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	78,25	BB	Sangat Baik
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	76,20	BB	Sangat Baik
7	SEKRETARIAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU	77,50	BB	Sangat Baik
8	DINAS PERHUBUNGAN	75,45	BB	Sangat Baik
9	DINAS PERIKANAN KOTA LUBUK LINGGAU	75,90	BB	Sangat Baik
10	DINAS KESEHATAN KOTA LUBUK LINGGAU	76,20	BB	Sangat Baik
11	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	72,25	BB	Sangat Baik
12	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	64,45	B	Baik

No	Perangkat Daerah	LHE		
		NILAI	KATEGORI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	73,10	BB	Sangat Baik
14	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU	72,10	BB	Sangat Baik
15	DINAS PARIWISATA KOTA LUBUK LINGGAU	73,00	BB	Sangat Baik
16	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	72,20	BB	Sangat Baik
17	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	70,55	BB	Sangat Baik
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	71,95	BB	Sangat Baik
19	DPPPAPM KOTA LUBUK LINGGAU	72,35	BB	Sangat Baik
20	KECAMATAN LUBUKLINGGAU UTARA I	70,50	BB	Sangat Baik
21	DINAS PERTANIAN KOTA LUBUK LINGGAU	73,20	BB	Sangat Baik
22	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	66,15	B	Baik
23	KECAMATAN LUBUKLINGGAU UTARA II	69,60	B	Baik
24	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	79,70	BB	Sangat Baik
25	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	70,55	BB	Sangat Baik
26	DINAS SOSIAL KOTA LUBUK LINGGAU	67,00	B	Baik
27	KECAMATAN LUBUKLINGGAU TIMUR I	66,10	B	Baik
28	KECAMATAN LUBUKLINGGAU SELATAN I	66,65	B	Baik
29	BKPSDM KOTA LUBUK LINGGAU	73,20	BB	Sangat Baik
30	KECAMATAN LUBUKLINGGAU BARAT I	69,45	B	Baik
31	DINAS KOPERASI & UMKM KOTA LUBUKLINGGAU	69,45	B	Baik
32	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	71,50	BB	Sangat Baik
33	DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA LUBUK LINGGAU	71,70	BB	Sangat Baik
34	DINAS KETAHANAN PANGAN	68,75	B	Baik
35	KECAMATAN LUBUKLINGGAU TIMUR II	68,95	B	Baik
36	KECAMATAN LUBUKLINGGAU BARAT II	55,30	CC	Cukup
37	KECAMATAN LUBUKLINGGAU SELATAN II	60,25	B	Baik
38	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	70,25	BB	Sangat Baik
39	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	70,45	BB	Sangat Baik

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa ada 3 (tiga) PD yang berpredikat "A" yaitu Memuaskan, 24 (dua puluh tiga) PD yang berpredikat "BB" yaitu Sangat

Baik, 11 (sebelas) PD mendapat predikat kategori "B" yaitu Baik, dan 1(satu) PD mendapat predikat kategori "CC" yaitu Cukup Baik.

Nilai di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada masing-masing PD di lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau yang diuraikan secara umum sebagai berikut :

a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Penilaian atas komponen Perencanaan Kinerja meliputi penilaian terhadap dokumen Rencana Strategis dan Perencanaan Kinerja Tahunan. Berdasarkan hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu :

- 1) Diharapkan Perangkat Daerah membuat website agar Dokumen Perencanaan Kinerja bisa di upload/dipublikasikan tepat waktu atau mengupload/dipublikasikan pada website Pemerintah Kota Lubuk Linggau <https://LubukLinggaukota.go.id/>;
- 2) Diharapkan kepada PD untuk lebih teliti dalam menginfokan kebutuhan utama atas kinerja yang telah ditetapkan sehingga tetap sasaran dalam pencapaiannya;
- 3) diharapkan PD untuk melampirkan PK dari Eselon III untuk melihat apakah sudah selaras dengan PK Kepala Dinas yang bersangkutan; dan
- 4) Dokumen Perencanaan Kinerja (Renja) baiknya memuat dan menggambarkan tujuan, sasaran, indikator sasaran/tujuan dan juga target sasaran/tujuan PD.

b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Penilaian atas komponen Pengukuran Kinerja meliputi Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi pengukuran. Berdasarkan hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

- 1) Diharapkan PD berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah Bagian Organisasi dan Hukum untuk menetapkan peraturan Wali Kota Lubuk Linggau tentang Pengumpulan Data Kinerja dan Pengukuran Data Kinerja agar bisa digunakan oleh setiap PD yang ada di lingkungan Kota Lubuk

Linggau;

- 2) Agar Menyusun SOP atau pedoman terkait penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional yang didasari dengan pengukuran kinerja;
- 3) Diharapkan kepada PD untuk lebih teliti dalam pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan target dan capaian yang telah ditetapkan dalam Restra;
- 4) Diharapkan PD untuk lebih Teliti dalam menganalisis dan menyajikan serta menerapkan Pengukuran Kinerja dalam penyesuaian strategi dan kebijakan untuk mencapai kinerja yang ditetapkan; dan
- 5) Diharapkan kepada PD agar membuat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja secara rinci mendefinisikan operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indicator kinerja.

c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Penilaian atas Pelaporan Kinerja meliputi Pemenuhan Pelaporan, Kualitas Pelaporan dan pemanfaatan Pelaporan. Berdasarkan hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu :

- 1) Diharapkan Perangkat Daerah membuat website agar Dokumen Laporan Kinerja bisa di upload/dipublikasikan tepat waktu atau mengupload/ dipublikasikan pada website Pemerintah Kota Lubuk Linggau <https://lubuklinggaukota.go.id/>;
- 2) Dokumen Laporan Kinerja agar melampirkan lembar/ Pernyataan bahwa telah direviu oleh atasan;
- 3) Diharapkan didalam Laporan Kinerja terdapat info tentang kualitas capaian Kinerja PD beserta upaya nyata (hambatan dan solusinya);
- 4) Laporan kinerja yang belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
- 5) Masih terdapat beberapa PD yang tidak menyajikan perbandingan data kinerja yang belum sesuai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain selama 5 (lima) tahun yang diperlukan;
- 6) Target-target yang ditetapkan tidak disertai dengan data yang relevan dan akurat;

- 7) Untuk melakukan pembuatan website khusus Perangkat Daerah atau website resmi Pemerintah Kota Lubuk Linggau <https://lubuklinggaukota.go.id/> terkait sehingga dokumen-dokumen terkait bisa dipublikasikan untuk menuju lebih transparan dan tepat waktu;
- 8) Dokumen Laporan Kinerja belum mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja; dan
- 9) Laporan kinerja belum memuat perbandingan realisasi/capaian kinerja (program) dengan pada tingkat nasional (Provinsi/Kementerian).

d. Evaluasi atas Evaluasi Internal

Penilaian atas evaluasi Internal terdiri dari Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi dan Pemanfaatan Evaluasi. Dari hasil evaluasi atas Evaluasi Internal, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu :

- 1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan pada unit kerja;
- 2) Memberikan pelatihan kepada pegawai yang membidangi perencanaan baik secara seminar/diklat;
- 3) belum ada SK tim evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal ;
- 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan secara berjenjang;
- 5) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan oleh SDM yang memadai;
- 6) Rekomendasi dari Laporan Hasil Evaluasi tahun sebelumnya belum digunakan untuk menyempurnakan Laporan Kinerja Tahun berjalan; dan
- 7) Belum ada tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Tahun sebelumnya.

BAB III

PENUTUP

Inspektorat menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau atas kesediannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025.

Inspektorat mengharapkan hasil evaluasi atas implementasi AKIP (LKjIP) Tahun 2025 ini dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman perbaikan atas apa yang perlu diperhatikan seperti perbaikan atas Rencana Aksi dari Perjanjian Kinerja meliputi pemantauan rencana aksi serta tindak lanjut hasil evaluasi atas rencana aksi. Selain itu diharapkan kedepannya kepada PD yang mendapat nilai A untuk terus mempertahankan penilaian tersebut. Hal ini dilakukan supaya dikemudian hari penyampaian hasil kinerja PD menjadi lebih baik dan terarah, sehingga dapat menambah penilaian atas pengukuran kinerja Pemerintah Kota Lubuk Linggau. Demikian disampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pemerintah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025.

Penanggung Jawab Evaluasi LkIP,
INSPEKTUR KOTA LUBUK LINGGAU



Drs. ERWIN ARMEIDI, M.Si
Pemula Utama Muda
NIP. 19700531 199003 1 002

LAMPIRAN

LEMBAR KERJA EVALUASI GABUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2025

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit Utama	Unit Pendukung	Unit Tambahan	Nilai Unit	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00					24,31	81,03%
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	5,75	5,84	5,68	5,75	5,75	95,91%
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	6,75	6,63	6,51	6,63	6,63	73,65%
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	11,88	12,14	11,77	11,93	11,93	79,51%
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00					22,44	74,80%
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	4,95	4,64	4,20	4,60	4,60	76,59%
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan kelanjutan	9,00	6,98	6,87	7,27	7,04	7,04	78,21%
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	10,88	11,05	10,50	10,81	10,81	72,05%
3	PELAPORAN KINERJA	15,00					10,24	68,28%
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	1,93	1,75	1,75	1,81	1,81	60,27%
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4,50	3,19	3,03	3,29	3,17	3,17	70,39%
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	5,25	5,18	5,37	5,27	5,27	70,21%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00					15,26	61,03%
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	3,67	3,36	3,58	3,54	3,54	70,71%
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	4,81	4,36	4,33	4,50	4,50	60,01%
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	7,81	7,50	6,35	7,22	7,22	57,76%
Nilai Akuntabilitas Kinerja							72,25	BB

LEMBAR KERJA KLASTER UTAMA PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2025

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit Utama	BAPPEDA	INSPEKTORAT	DISDIKBUD	DINKES	PUPR	PERKIM	SAT.POLPP
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	24,38	25,80	29,10	22,80	25,80	22,20	22,20	23,70
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	5,75	6,00	6,00	6,00	6,00	5,40	5,40	6,00
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	6,75	6,30	8,10	6,30	6,30	6,30	6,30	7,20
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	11,88	13,50	15,00	10,50	13,50	10,50	10,50	10,50
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	22,80	24,60	24,60	20,70	23,40	21,60	21,00	22,20
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	4,95	5,40	5,40	5,40	4,80	4,80	4,20	5,40
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan	9,00	6,98	7,20	7,20	6,30	8,10	6,30	6,30	6,30
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	10,88	12,00	12,00	9,00	10,50	10,50	10,50	10,50
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	10,36	11,70	10,50	8,40	9,00	10,50	10,50	12,30
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	1,93	2,10	2,10	1,50	1,80	2,10	2,10	2,70

3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan	4,50	3,19	3,60	3,15	3,15	2,70	3,15	3,15	3,60
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	5,25	6,00	5,25	3,75	4,50	5,25	5,25	6,00
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00	16,29	18,50	19,25	14,25	18,00	16,25	18,50	18,00
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	3,67	4,50	4,00	3,00	4,00	3,50	4,50	4,00
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	4,81	5,25	5,25	3,75	5,25	5,25	5,25	5,25
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	7,81	8,75	10,00	7,50	8,75	7,50	8,75	8,75
	Nilai Akuntabilitas Kinerja		73,83	80,60	83,45	66,15	76,20	70,55	72,20	76,20
				A	A	B	BB	BB	BB	BB

LEMBAR KERJA KLASTER UTAMA PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2025

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit Utama	BAPPEDA	INSPEKTORAT	DISDIKBUD	DINKES	PUPR	PERKIM	SAT.POL.PP
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	24,38	25,80	29,10	22,80	25,80	22,20	22,20	23,70
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	5,75	6,00	6,00	6,00	6,00	5,40	5,40	6,00
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	6,75	6,30	8,10	6,30	6,30	6,30	6,30	7,20
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yangberkesinambungan	15,00	11,88	13,50	15,00	10,50	13,50	10,50	10,50	10,50
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	22,80	24,60	24,60	20,70	23,40	21,60	21,00	22,20
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	4,95	5,40	5,40	5,40	4,80	4,80	4,20	5,40
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjerjang	9,00	6,98	7,20	7,20	6,30	8,10	6,30	6,30	6,30
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	10,88	12,00	12,00	9,00	10,50	10,50	10,50	10,50
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	10,36	11,70	10,50	8,40	9,00	10,50	10,50	12,30
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	1,93	2,10	2,10	1,50	1,80	2,10	2,10	2,70
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempumaannya	4,50	3,19	3,60	3,15	3,15	2,70	3,15	3,15	3,60

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit Utama	BAPPEDA	INSPEKTORAT	DISDIKBUD	DINKES	PUPR	PERKUM	SAT.POL.PP
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	5,25	6,00	5,25	3,75	4,50	5,25	5,25	6,00
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00	16,29	18,50	19,25	14,25	18,00	16,25	18,50	18,00
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	3,25	3,00	4,50	3,00	3,00	2,50	2,50	4,00
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	4,84	4,50	3,75	5,25	5,25	4,50	4,50	5,25
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	8,85	11,25	6,25	11,25	8,75	6,25	11,25	8,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja			74,42	81,45	82,45	71,55	75,20	72,50	72,55	75,20
				A	A	BB	BB	BB	BB	BB

LEMBAR KERJA KLASTER UTAMA PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2025

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	DINSOS	PERTANIAN	PERIKANAN	DISDAGRIN	DISPAR	DPKPB	KESBANGPOL
1	PERENCANAAN KINERJA	25,80	22,20	24,60	22,20	26,10	22,80	25,20
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	5,40	6,00	5,40	5,40	6,00	6,00
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	6,30	6,30	8,10	6,30	7,20	6,30	7,20
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	13,50	10,50	10,50	10,50	13,50	10,50	12,00
2	PENGUKURAN KINERJA	24,00	22,50	23,10	23,10	22,80	21,60	23,10
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	5,40	4,80	4,20	5,40	4,20	3,00	5,40
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan	8,10	7,20	5,40	7,20	8,10	8,10	7,20
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	10,50	10,50	13,50	10,50	10,50	10,50	10,50
3	PELAPORAN KINERJA	8,70	10,50	10,20	10,95	11,10	11,10	10,65
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	1,50	2,10	1,80	1,50	1,80	1,80	1,50

3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, Informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan	2,70	3,15	3,15	2,70	4,05	4,05	3,15
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	4,50	5,25	5,25	6,75	5,25	5,25	6,00
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	8,50	18,00	18,00	15,25	13,00	14,75	11,50
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	2,50	4,00	4,00	3,00	3,00	3,50	3,00
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	2,25	5,25	5,25	6,00	3,75	3,75	2,25
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	3,75	8,75	8,75	6,25	6,25	7,50	6,25
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	67,00	73,20	75,90	71,50	73,00	70,25	70,45
		B	BB	BB	BB	BB	BB	BB

LEMBAR KERJA KLASTER PENDUKUNG PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2025

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit Utama	DISNA KER	DP3APM	DPPKB	DIS PANG	DLH	CAPIL	DIS HUB	D.KOP & UMKM	DPM - PTSP	DIS PORA	PERPUS TAKAAN
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	24,60	27,30	25,80	22,80	23,70	27,60	22,20	22,20	22,80	22,80	27,60	25,80
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	5,84	6,00	6,00	6,00	5,40	6,00	5,40	5,40	6,00	6,00	6,00	6,00
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	6,63	6,30	6,30	6,30	6,30	8,10	6,30	6,30	6,30	6,30	8,10	6,30
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yangberkesinambungan	15,00	12,14	15,00	13,50	10,50	12,00	13,50	10,50	10,50	10,50	10,50	13,50	13,50
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	22,55	22,50	23,10	21,00	23,10	22,50	21,00	24,00	23,40	22,20	21,90	23,40
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	4,64	4,80	4,80	4,20	5,40	4,80	4,20	4,80	4,80	5,40	4,20	3,60
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan	9,00	6,87	7,20	6,30	6,30	7,20	7,20	6,30	7,20	8,10	6,30	7,20	6,30
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	11,06	10,50	12,00	10,50	10,50	10,50	10,50	12,00	10,50	10,50	10,50	13,50
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	9,95	10,65	7,95	10,50	9,45	10,65	11,40	11,25	9,00	7,95	10,95	9,75
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	1,75	1,50	1,50	2,10	1,50	1,50	1,50	2,10	1,80	1,50	2,10	2,10

3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempumaannya	4,50	3,03	3,15	2,70	3,15	2,70	3,15	3,15	3,15	2,70	2,70	3,60	3,15
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	5,18	6,00	3,75	5,25	5,25	6,00	6,75	6,00	4,50	3,75	5,25	4,50
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00	15,23	11,25	15,50	16,25	12,50	17,50	18,50	18,00	14,25	11,50	19,25	13,00
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	3,36	3,00	4,00	3,00	2,50	3,00	4,50	4,00	3,00	3,00	4,00	3,00
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	4,36	4,50	5,25	4,50	3,75	4,50	5,25	5,25	3,75	2,25	5,25	3,75
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	7,50	3,75	6,25	8,75	6,25	10,00	8,75	8,75	7,50	6,25	10,00	6,25
Nilai Akuntabilitas Kinerja			72,34	71,70	72,35	70,55	68,75	78,25	73,10	75,45	69,45	64,45	79,70	71,95
				BB	BB	BB	B	BB	BB	BB	B	B	BB	BB

LEMBAR KERJA KLASTER TAMBAHAN PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2025

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit Utama	DKOMINFO	SEKDA	SETWAN	BKPSDM	BPKAD	BAPENDA	KEC. BARAT I
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	23,95	27,60	24,30	22,20	25,20	25,80	25,80	23,70
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	5,68	6,00	6,00	5,40	6,00	6,00	6,00	5,40
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	6,51	8,10	6,30	6,30	7,20	6,30	6,30	6,30
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	11,77	13,50	12,00	10,50	12,00	13,50	13,50	12,00
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	21,97	24,00	24,00	24,00	23,10	23,40	23,40	20,10
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	4,20	4,80	5,40	5,40	5,40	4,80	4,80	0,00
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang	9,00	7,27	7,20	8,10	8,10	7,20	8,10	8,10	8,10
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	10,50	12,00	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	12,00
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	10,41	12,00	10,20	9,90	10,65	9,90	10,05	12,15
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	1,75	2,40	1,80	1,50	1,50	1,50	2,10	2,10

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit Utama	DKOMINFO	SEKDA	SETWAN	BKPSDM	BPKAD	BAPENDA	KEC. BARAT I
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	3,29	3,60	3,15	3,15	3,15	3,15	2,70	4,05
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	5,37	6,00	5,25	5,25	6,00	5,25	5,25	6,00
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00	14,25	19,25	19,00	16,00	14,25	14,00	13,00	13,50
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	3,58	4,00	4,50	4,50	3,00	4,00	3,00	4,50
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	4,33	5,25	4,50	5,25	3,75	3,75	3,75	5,25
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	6,35	10,00	10,00	6,25	7,50	6,25	6,25	3,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja			70,58	82,85	77,50	72,10	73,20	73,10	72,25	69,45
				A	BB	BB	BB	BB	BB	B

LEMBAR KERJA KLASTER TAMBAHAN PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2025

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit Utama	KEC. BARAT II	KEC. UTARA I	KEC. UTARA II	KEC. TIMUR I	KEC. TIMUR II	KEC. SELATAN I	KEC. SELATAN II
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	23,95	21,90	22,80	26,10	22,20	21,60	22,20	19,20
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	5,68	6,00	6,00	5,40	5,40	4,80	5,40	4,80
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyaluran (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	6,51	5,40	6,30	7,20	6,30	6,30	6,30	5,40
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	11,77	10,50	10,50	13,50	10,50	10,50	10,50	9,00
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	21,97	15,60	21,30	23,10	20,70	20,70	22,20	18,60
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	4,20	1,80	3,60	3,00	4,80	5,40	5,40	4,20
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang	9,00	7,27	6,30	7,20	8,10	5,40	6,30	6,30	5,40
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	10,50	7,50	10,50	12,00	10,50	9,00	10,50	9,00
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	10,41	7,80	11,40	12,15	10,20	9,15	9,75	9,45
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	1,75	0,90	1,80	2,10	1,80	1,50	1,80	1,80
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan	4,50	3,29	3,15	3,60	4,05	3,15	3,15	2,70	3,15
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	5,37	3,75	6,00	6,00	5,25	4,50	5,25	4,50
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00	14,25	10,00	15,00	8,25	13,00	17,50	12,50	13,00
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	3,58	2,50	3,00	4,50	3,00	3,50	2,50	3,00

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit Utama	KEC. BARAT II	KEC. UTARA I	KEC. UTARA II	KEC. TIMUR I	KEC. TIMUR II	KEC. SELATAN I	KEC. SELATAN II
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	4,33	3,75	4,50	3,75	3,75	5,25	3,75	3,75
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	6,35	3,75	7,50	0,00	6,25	8,75	6,25	6,25
Nilai Akuntabilitas Kinerja			70,58	55,30	70,50	69,60	66,10	68,95	66,65	60,25
				CC	BB	B	B	B	B	B

